

TESIS

IDILOGI DOMINAN DIBALIK WACANA TENTANG “KOMUNIS  
GAYA BARU”

(Analisis Wacana Berita Penyerangan FPI terhadap Papernas di Media  
Massa Periode Mei 2007)

Oleh :

Muhammad Saefulloh

NPM : 2002-03-009

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)

JAKARTA

2008

LEMBAR PENGESAHAN TESIS  
IDIOLOGI DOMINAN DIBALIK WACANA TENTANG “KOMUNIS  
GAYA BARU”

(Analisis Wacana Berita Penyerangan FPI terhadap Papernas di Media  
Massa Periode Mei 2007)

Tlah disetujui pada tanggal : 7 Maret 2008

Oleh :

Pembimbing I



Dr. Ibnu Hamad, M.Si

Pembimbing II

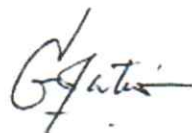


Dr. Gati Gayatri, MA

Mengetahui :

Ketua Program

Magister Ilmu Komunikasi



Dr. Gati Gayatri, MA

Direktur

Program Pascasarjana



Prof. Dr. Abdullah, SE, MM

LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS

IDILOGI DOMINAN DIBALIK WACANA TENTANG “KOMUNIS  
GAYA BARU”

(Analisis Wacana Berita Penyerangan FPI terhadap Papernas di Media  
Massa Periode Mei 2007)

Telah diuji pada tanggal : 23 Maret 2008

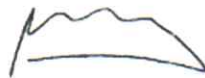
Penguji

Dr. Gati Gayatri, MA



: .....

Dr. Udi Rusadi, M.Si



: .....

Dr. Ibnu Hamad, M.Si



: .....

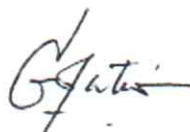
Mengetahui :

Ketua Program

Direktur

Magister Ilmu Komunikasi

Program Pascasarjana



Dr. Gati Gayatri, MA



Prof. Dr. Abdullah, SE, MM

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	4
C. Perumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
1. Manfaat Akademis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	6
F. Metode Penelitian.....	6
1. Paradigma Penelitian.....	6
2. Desain Penelitian.....	7
3. Subjek dan Objek Penelitian.....	8
4. Teknik Pengumpulan.....	8
5. Metode Analisis Data.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
A. Radikalisme Agama .....	11
1. Pengertian Radikalisme Agama.....	11
B. Sejarah Munculnya Radikalisme Agama.....	13
C. Faktor-Faktor Penyebab Kemunculan Radikalisme.....	15
D. Idiologi Media.....	17
E. Konstruksi Sosial Atas Realitas.....	21

F. Fungsi Media.....	22
1. Komunikasi Massa Bersifat Umum.....	23
2. Komunikator Pada Komunikasi Massa Bersifat Melembaga.....	24
3. Komunikasi Berlangsung Satu Arah.....	24
4. Komunikasikan Pada Komunikasi Massa Bersifat Heterogen.....	24
5. Media Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan.....	24
<b>BAB III ANALISIS FRAMING.....</b>	<b>26</b>
A. Framing (Model Robert N. Entman) .....	26
<b>BAB IV ANALISIS FRAMING INSIDEN MONAS.....</b>	<b>34</b>
A. Deskripsi Umum Koran Kompas Dan Republika.....	34
1. Kompas.....	34
2. Republika.....	35
B. Pemberitaan Kekerasan Pada Koran Kompas.....	37
C. Frame Kompas.....	50
D. Pemberitaan Kekerasan Monas pada Koran Republika.....	56
E. Frame Republika.....	71
F. Perbandingan Frame Kompas dan Republika.....	80
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
1. Kompas.....	84
2. Republika.....	85
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Munculnya isu-isu politis mengenai radikalisme Islam merupakan tantangan baru bagi umat Islam untuk menjawabnya. Isu radikalisme Islam ini sebenarnya sudah lama mencuat di permukaan wacana internasional. Radikalisme Islam sebagai fenomena historis dan sosiologis merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam wacana politik dan peradaban global akibat kekuatan media yang memiliki potensi besar dalam menciptakan persepsi masyarakat dunia.

Banyak label-label yang diberikan oleh kalangan Eropa Barat dan Amerika Serikat untuk menyebut gerakan Islam radikal ini, mulai dari sebutan kelompok garis keras, ekstrimis, militan, fundamentalisme, sampai terorisme. Bahkan negara-negara barat pasca runtuhnya ideologi komunisme memandang Islam sebagai sebuah gerakan peradaban yang menakutkan. (Madjid, 1995).

Surat kabar ialah salah satu sarana komunikasi yang dalam penyajiannya menggunakan bahasa nonverbal. Ragam tulis dalam penggunaannya diperlukan ketelitian dan kecermatan, karena di dalam ragam tulis informasi yang disampaikan tidak selengkap ragam verbal. Oleh karena itu, terkadang informasi yang disampaikan melalui surat kabar terdapat perbedaan dengan kenyataannya. Hal ini tentunya juga dipengaruhi oleh kemampuan seorang penulis dalam membuat wacana yang dimuat dalam suatu media masa. Baryadi (2002) menjelaskan bahwa istilah wacana digunakan dalam istilah linguistik. Wacana juga merupakan satuan bahasa komplet yang dinyatakan secara lisan maupun

tulisan bersifat kohesif, koheren dan terpadu, serta mencerminkan hasil interaksi sosial sehingga dapat dipahami oleh pembaca

Fenomena kekerasan yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) terhadap massa Partai Persatuan Nasional (Papernas). Menambah aksi aksi kekerasan yang mengatasnamakan Islam dalam aksi kekerasannya tersebut. Berbagai spekulasi mengenai penyebab terjadinya insiden yang dikalangan media lebih dikenal dengan nama insiden Gambir ini, sempat dilontarkan oleh beberapa pihak.

Terjadinya insiden Gambir ini sempat menjadi *headline* di beberapa media massa di Indonesia. Selama sepekan baik itu media elektronik maupun media cetak menayangkan dan menampilkan berita mengenai insiden Gambir. Berita mengenai insiden Gambir ini adalah salah satu berita dengan sensitifitas yang cukup tinggi. Banyak redaksi baik media cetak ataupun elektronik yang menyatakan bahwa insiden Gambir merupakan salah satu isu paling sensitif ketika masuk sidang redaksi. Sensitif karena berita ini berkaitan dengan persoalan ideologi, yaitu persoalan yang menyangkut banyak pihak. Sikap masing-masing redaksi dan institusi media terhadap persoalan tersebut pastilah berbeda. Peristiwa boleh saja sama, tetapi sudut pandang pastilah berbeda.

Media massa memberikan porsi yang cukup besar dalam menyiarkan insiden Monas ini, tak terkecuali dua surat kabar harian nasional, *Kompas* dan *Republika*, dua media tersebut memberikan pandangan yang cukup berbeda mengenai insiden Gambir.. *Kompas* yang di kenal dengan sifat humanismenya, yang pada mulanya diterbitkan oleh partai Khatolik dan sejumlah jurnalis Khatolik

yang kemudian berubah menjadi koran independen. Mengupas insiden Gembira sebagai persoalan bangsa dengan menyetengahkan judul “Kebhinekaan Di ciderai”, sedangkan *Republika* pada hari yang sama menempatkan kasus tersebut juga pada halaman utama dengan menyetengahkan judul “Bentrokan Akibat Pemerintahan Lamban”. Selama bulan Mei 2007, *Koran Kompas* selalu menjadikan insiden Gembira ini sebagai *headline* dan ditempatkan pada bagian depan, sedangkan *Republika*, tercatat tujuh kali menjadikan insiden Gembira ini sebagai *headline* di halaman depan.

Dari salah satu judul yang diangkat oleh kedua media cetak tersebut dan judul-judul lainnya serta pandangan kedua media cetak tersebut mengenai insiden monas tampak menarik untuk diteliti. Salah satu fungsi media massa sendiri adalah memberikan informasi kepada khalayak. Berbagai media massa yang telah ada, dimanfaatkan oleh khalayak untuk memenuhi kebutuhannya akan informasi yang secara otomatis akan lebih mengembangkan wawasan intelektual mereka. Menyampaikan berita secara obyektif adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh institusi media dan wartawan. Meskipun mereka telah menyampaikan informasi secara akurat dan aktual namun, pada kenyataannya berita yang disampaikan masih jauh dari obyektifitas.

*Analisis wacana* yang penulis kedepankan dalam penelitian ini penting bagi masyarakat yang merupakan konsumen berita yang disajikan media-media yang ada. Analisis ini digunakan untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksikan fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan dan tautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih mudah diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai dengan prespektifnya. (Sobur, 2006).

---



Kemampuan untuk menganalisis berita membuat kita tidak mudah untuk digiring sesuai perspektif media, terlebih di negeri ini yang banyak sekali terdapat perbedaan. Indonesia sebagai negeri yang majemuk memiliki beragam budaya, ras hingga agama. Perbedaan yang begitu tampak di masyarakat dan itu memberikan peluang hadirnya konflik diberbagai sisi. Dalam hal ini konflik agama menjadi hal yang begitu mengkhawatirkan di Indonesia.

Oleh karena itu, melalui penelitian ini, peneliti memandang perlu untuk mengkaji lebih jauh karakter pemberitaan media *Kompas* dan *Republika* mengenai insiden Gambir.

## **B. Pembatasan Masalah**

Untuk menjaga pembahasan ini agar tidak terlalu luas, maka penulis memberikan batasan dalam upaya penulisan ini. Ruang lingkup dibatasi hanya pada berita yang dikeluarkan oleh surat kabar *Kompas* dan *Republika*. Kemudian batasan waktu yang penulis ambil di mulai pada hari kejadian yaitu pada tanggal 1 Mei 2007 sampai tanggal 6 Mei 2007. Waktu ini diambil dengan mempertimbangkan awal dan akhir isu ini di perbincangkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Analisis Wacana* model Van Dijk.

## **C. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan pembatasan masalah yang sudah penulis sampaikan di atas. Penulis mencoba membuat rumusan masalah pada penelitian ini, rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana surat kabar *Kompas* dan *Republika* mengemas pemberitaan seputar insiden Gambir tahun 2007?

2. Bagaimana struktur *define problem* (pendefinisian masalah) pada berita-berita terkait penyebab terjadinya insiden Monas di Koran Kompas dan *Republika*?
3. Bagaimana struktur *diagnoses causes* (sumber masalah) pada pemberitaan terkait penyebab terjadinya insiden Monas di Koran Kompas dan *Republika*?
4. Bagaimana struktur *make moral judgment* (nilai moral apa yang diberikan) pada pemberitaan terkait penyebab terjadinya insiden Monas di Koran Kompas dan *Republika*?
5. Bagaimana struktur *treatment recommendation* (solusi) pada pemberitaan terkait penyebab terjadinya insiden Monas di Koran Kompas dan *Republika*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan analisis framing terhadap pemberitaan aksi kekerasan FPI terhadap Papernas yang diberitakan surat kabar Kompas dan *Republika*, penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat struktur *define problem*, *diagnoses causes*, *make moral judgment*, *treatment recommendation* antara koran Kompas dan *Republika* dalam pemberitaan seputar insiden Gambir yang melibatkan FPI dan papernas.
2. Untuk mengetahui perbedaan proses wacana Koran Kompas dan *Republika* mengenai insiden Gambir.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan skripsi Analisis Wacana ini, penulis berupaya memberikan manfaat baik untuk kegunaan akademis maupun kegunaan praktis. Manfaat tersebut antara lain:

## 1. Manfaat Akademis

Skripsi ini diharapkan bermanfaat secara akademis, yaitu dapat menambah wawasan keilmuan, khususnya tentang konstruksi realitas media cetak, dengan menggunakan analisis wacana.

## 2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap analisis framing yang dilakukan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi dunia Komunikasi. Serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang proses analisis yang dilakukan oleh media cetak.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Paradigma Penelitian

Berangkat dari pemikiran Guba dan Lincoln bahwa paradigma ilmu pengetahuan (komunikasi) terbagi menjadi tiga, yaitu paradigma klasik (classical paradigm), yang kedua adalah paradigma kritis (critical paradigm), dan yang ketiga adalah paradigma konstruktivisme (constructivism paradigm).<sup>3</sup>

Seperti pada umumnya penelitian *Analisis framing*, yaitu analisis yang melihat wacana sebagai hasil dari konstruksi realitas sosial, maka penelitian ini termasuk dalam kategori paradigma konstruksionis. Paradigma konstruksionis yang sering disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna. Dengan konsentrasi analisis yaitu menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksikan dan dengan cara apa konstruksi dibentuk.<sup>4</sup> Paradigma konstruksionis memperhatikan interaksi antara

---

<sup>3</sup> Burhan Bungin, *sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 237

<sup>4</sup> Eriyanto, *Analisis framing, Konstruksi Idiologi, dan Politik Media*, h. 37

komunikator dan komunikan untuk menciptakan pemaknaan atau tafsiran dari suatu pesan. Paradigma konstruksionis menekankan pada politik pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas. Paradigma ini memandang kegiatan komunikasi sebagai proses yang dinamis. Titik perhatian tidak terletak pada bagaimana seseorang mengirimkan pesan, melainkan bagaimana masing-masing pihak yang terlibat dalam lalu lintas komunikasi memproduksi dan mempertukarkan makna

Dalam buku “*Analisis Wacana Konstruksi, Idiologi dan Politik media*”, Eriyanto menyebutkan bahwa, penelitian dengan paradigma konstruksionis memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

- 1) Memiliki tujuan untuk menentukan realitas yang terjadi sebagai hasil interaksi antara peneliti dengan objek penelitian
- 2) Peneliti melibatkan dirinya dengan realitas yang diteliti
- 3) Makna yang dihasilkan dari suatu teks merupakan hasil negoisasi antara teks dengan peneliti
- 4) Hasil penelitian merupakan interaksi antara peneliti dan objek penelitian
- 5) Subjektivitas peneliti menjadi dasar dari proses analisis
- 6) Empati dan interaksi dialektis antara peneliti dan teks sangat ditekankan dalam rekonstruksi realitas yang diteliti
- 7) Kualitas dilihat dari sejauh mana peneliti mampu menyerap dan mengerti bagaimana individu mengkonstruksikan realitas

## 2. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial di masyarakat. Penelitian ini bersifat kualitatif karena dalam pelaksanaannya lebih

dilakukan pada pemaknaan teks dari pada penjumlahan kategori. Pendekatan kualitatif tidak menggunakan prosedur statistik dalam pendekatannya, melainkan dengan berbagai macam sarana. Sarana tersebut antara lain, pengamatan, atau juga dapat melalui dokumen, naskah, buku, dan lain lain. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling, penelitian ini lebih menekankan pada kualitas data bukan kuantitas data.<sup>5</sup>

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Koran Kompas dan *Republika*, sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah berita-berita Sseputar insiden Gambir 2007, terkait bentrokan antara organisasi massa Front Pembela Islam (FPI) dan organisasi massa Partai Persatuan Nasional (Papernas).

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan sasaran utama dalam analisis, sedangkan data sekunder diperlukan guna mempertajam analisis data primer sekaligus dapat disajikan bahan pendukung ataupun prbandingan

#### a. Data primer (Primary-Sources)

Ialah data tekstual yang diperoleh dari Koran Kompas dan *Republika*. Penulis memilih berita yang menyangkut insiden Gambir, 1 Mei 2007.

#### b. Data Sekunder (Secondary-sources)

---

<sup>5</sup>Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta :Kencana prenada Media group, 2006), h. 58

Yaitu dengan mencari referensi buku-buku, Koran, Jurnal maupun tulisan lain yang lainya demi mendukung penelitian ini.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Analisis wacana*, Wacana adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Data yang ada dikumpulkan, kemudian diolah dengan model *Analisis framing* Robert N. Entman, sehingga akan terlihat bagaimana Koran Kompas dan *Republika* mengemas berita tentang penyebab terjadinya insiden Monas.

Berdasarkan pada model *Analisis framing* yang penulis ambil yaitu model Robert Entman yang terbagi menjadi empat struktur: ***define problem*** menekankan pada bagaimana suatu peristiwa dipahami oleh wartawan, ***diagnose causes***: menekankan pada apa dan siapa yang menjadi sumber dari suatu masalah pada suatu peristiwa, ***make moral judgement***: dipakai untuk membenarkan atau memberikan nilai moral pada peristiwa yang terjadi dan ***treatment recommendation***: dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan.

## G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini bersifat sistematis maka dalam penulisannya, penulis berpedoman pada buku yang berjudul Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi), karya Hamid Nasuhi, dkk, terbitan Ceqda, Jakarta, 2007. Penulis membagi skripsi ini menjadi (5) lima bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN:** membahas latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II KAJIAN TEORITIS:** membahas Radikalisme Agama, Idiologi Media, Konstruksi Sosial Atas Realitas, Fungsi Media Massa.

**BAB III ANALISIS FRAMING:** membahas pengertian Framing dan framing Model Robert N. Entman

**BAB IV HASIL ANALISIS FRAMING DALAM PEMBERITAAN INSIDEN MONAS MELALUI KORAN KOMPAS DAN REPUBLIKA:** membahas Frame koran Kompas dan Republika dalam memberitakan insiden Monas

**BAB V PENUTUP:** membahas kesimpulan dan saran

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Radikalisme Agama

##### 1. Pengertian Radikalisme Agama

Membahas tentang radikalisme tentu harus tahu terlebih dahulu akar kata radikalisme secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi radikal berarti bagian dasar atau akar sesuatu, sedangkan menurut terminologi adalah perubahan yang sangat cepat.<sup>1</sup> Dalam bahasa Arab disebut at-tathorruf diartikan “ekstrimisme”, “melampaui batas”, dan “berlebih-lebihan”. Radikalisme diartikan sebagai sebuah paham, aliran yang radikal dalam politik, menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik secara cepat melalui cara yang ekstrem dan keras. Aliran radikal ini diperkenalkan dan dipelopori oleh Voltaire.<sup>2</sup> Sedangkan pengertian dari agama, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yakni sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Yusuf Qardhawi dalam bukunya: *Islam Radikal* mengungkapkan bahwa, penjelasan tentang makna radikalisme dan pendefinisian secara ilmiah merupakan hal yang sangat urgen. Oleh karena itu menurutnya, makna radikalisme jangan terlepas dari konteks pemahaman yang benar sesuai syar’i. Ia menambahkan, jika makna radikalisme

---

<sup>1</sup>Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English, 1991)

<sup>2</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah, Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999), h.48



keagamaan ditujukan pada pendapat dan hawa nafsu manusia, niscaya jalan yang akan ditempuh bercabang-cabang sesuai dengan selera manusia yang tidak akan pernah habis-habisnya.

Berbeda dengan Syekh Thareq Lahham yang menyebut radikalisme dengan ekstrimisme. Ekstrimisme merupakan tindakan yang menyalahi *syara'* yang mengambil posisi yang sangat tajam di antara dua pihak yang saling bertentangan, masing-masing keduanya memiliki tujuan merubah kondisi sosial tertentu dengan cara yang bertentangan dengan agama.<sup>3</sup>

Istilah Radikalisme untuk menyebut kelompok garis keras dipandang lebih tepat ketimbang fundamentalisme, karena fundamentalisme sendiri memiliki makna yang interpretable. Dalam perspektif Barat, fundamentalisme berarti paham orang-orang kaku, ekstrim, serta tidak segan-segan berperilaku dengan kekerasan dalam mempertahankan idologinya. Sementara dalam perspektif islam, fundamentalisme berarti *tajdid* (pembaruan) berdasarkan pesan moral Al-Quran dan Sunnah<sup>4</sup>

Radikalisme merupakan gerakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dirugikan oleh fenomena sosio-politik dan sosio-historis. Gejala praktik kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam itu, secara historis dan sosiologis, lebih tepat sebagai gejala sosial politik ketimbang gejala keagamaan meskipun dengan mengibarkan panji-panji keagamaan.

---

<sup>3</sup>

Syekh Thareq Lahham, *Petualangan Terorisme Dari Pengkafiran Sampai Pengeboman*, (Jakarta:

<sup>4</sup> Muhammad Imarah, *Fundamentalisme dalam Perspektif Pemikiran Barat dan Islam*, Terjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 22

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud radikalisme agama adalah sebuah paham terhadap seseorang ataupun gerakan, yang memiliki tujuan untuk merubah kondisi sosial-politik karena tidak sesuai dengan ajaran agama secara cepat, dilakukan melalui secara keras dan ekstrem. Namun, istilah radikalisme kerap kali digunakan dalam mencap harakah (aliran) islamiyyah saja, sehingga kata radikal ini cenderung mencoreng nama baik ajaran Islam sebagai agama *rahmatan lil alamiin*.

## **B. Sejarah Munculnya Radikalisme Agama**

Permasalahan radikalisme tidak muncul begitu saja, namun pastilah ada sebab-sebab yang memicunya dan memiliki latar belakang serta faktor yang menyebabkan aksi radikalisme terutama yang mengatasnamakan agama Islam. Permasalahan radikalisme muncul terkait dengan kondisi sosial, agama maupun politik. Dalam teori sosial, radikalisme adalah sebuah gerakan yang terkait atau disebabkan oleh fakta lain.

Pada dasarnya, istilah radikalisme ini tidak ada dalam terminologi agama khususnya agama Islam, namun istilah ini muncul dan dikembangkan oleh bangsa Barat untuk menyebut kelompok Islam murni. Menurut mereka, kelompok tersebut kerap kali melakukan berbagai aksi kekerasan, atau teror terhadap bangsa Barat, terutama saat terjadi konflik lokal antara Israel dan Palestina, kalangan Barat mendukung pergerakan Israel, sehingga konflik tersebut meningkat ke level internasional. Inilah yang menimbulkan kebencian ummat Islam terutama kalangan Timur Tengah terhadap kalangan Barat, yang kemudian seakan-akan

merasa terpaksa dan dipaksa untuk melakukan aksi kekerasan, sehingga kalangan barat dapat menyebut aksi-aksi tersebut sebagai tindakan radikalisme.

Dalam panggung politik domestik, munculnya gerakan gerakan radikalisme keagamaan ditandai dengan maraknya aksi-aksi yang melibatkan massa yang dimotori oleh berbagai kelompok islam garis keras yang pada umumnya memiliki tujuan yang sama dalam satu hal.

Pada dasarnya, istilah radikalisme ini tidak ada dalam terminologi agama khususnya agama Islam, namun istilah ini muncul dan dikembangkan oleh bangsa Barat untuk menyebut kelompok Islam murni. Menurut mereka, kelompok tersebut kerap kali melakukan berbagai aksi kekerasan, atau teror terhadap bangsa Barat, terutama saat terjadi konflik lokal antara Israel dan Palestina, kalangan Barat mendukung pergerakan Israel, sehingga konflik tersebut meningkat ke level internasional. Inilah yang menimbulkan kebencian ummat Islam terutama kalangan Timur Tengah terhadap kalangan Barat, yang kemudian seakan-akan merasa terpaksa dan dipaksa untuk melakukan aksi kekerasan, sehingga kalangan barat dapat menyebut aksi-aksi tersebut sebagai tindakan radikalisme.

Tidak hanya agama Islam saja yang kerap kali melakukan tindakan radikalisme atau kekerasan, tapi agama lain juga melakukannya, karena radikalisme sangat berkaitan dengan fundamentalisme, yang ditandai dengan kembalinya masyarakat kepada dasar-dasar agama. Fundamentalisme akan

diiringi oleh radikalisme dan kekerasan ketika kebebasan untuk kembali kepada agama tadi dihalangi oleh situasi politik yang mengelilingi masyarakat.<sup>5</sup>

Islam merupakan agama kedamaian yang mengajarkan sikap berdamai dan mencari perdamaian. Islam tidak pernah membenarkan praktik penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, paham keagamaan, serta paham politik. Tetapi memang tidak bisa dibantah bahwa dalam perjalanan sejarahnya terdapat kelompok-kelompok Islam tertentu yang menggunakan jalan kekerasan untuk mencapai tujuan politis atau mempertahankan paham keagamaannya secara kaku yang dalam bahasa peradaban global sering disebut kaum radikalisme Islam.

Dari sejarah tersebut penulis menyimpulkan bahwa radikalisme agama merupakan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh segelintir orang atau kelompok tertentu untuk mengekspresikan idologinya dan selalu berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinannya.

### **C. Faktor-Faktor Penyebab Kemunculan Radikalisme**

Dalam pandangan kaum fakta sosial bahwa ada tiga asumsi yang mendasari keseluruhan cara berpikirnya, yaitu terdapat keajegan atau terdapat keteraturan sosial (*social order*), terdapat perubahan sekali waktu dan tidak ada fakta yang berdiri sendiri kecuali ada fakta penyebabnya. Akar radikalisme dapat ditilik dari beberapa penyebab, antara lain: *pertama*, adanya tekanan politik penguasa terhadap keberadaannya. Di beberapa belahan dunia, termasuk Indonesia

---

<sup>5</sup>Endang Turmudi dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta : LIPI Press,

fenomena radikalisme atau fundamentalisme muncul sebagai akibat otoritarianisme<sup>6</sup>

*Kedua*, faktor emosi keagamaan. Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Lebih tepat dikatakan hal itu sebagai faktor emosi keagamaannya dan bukan agama (wahyu suci yang absolut), karena gerakan radikalisme selalu mengibarkan bendera dan simbol agama seperti dalih membela agama, jihad, dan mati syahid. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan emosi keagamaan adalah agama sebagai pemahaman realitas yang sifatnya interpretatif, dan subjektif.

*Ketiga*, faktor kultural ini juga memiliki andil yang cukup besar yang melatarbelakangi munculnya radikalisme. Hal ini wajar karena memang secara kultural, sebagaimana diungkapkan Musa Asy'ari, bahwa di dalam masyarakat selalu ditemukan usaha untuk melepaskan diri dari jeratan jaring-jaring kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai. Sedangkan yang dimaksud faktor kultural di sini adalah sebagai antitesis terhadap budaya sekularisme. Budaya Barat merupakan sumber sekularisme yang dianggap sebagai musuh yang harus dihilangkan dari bumi. Sedangkan fakta sejarah memperlihatkan adanya dominasi Barat dari berbagai aspeknya atas negeri-negeri dan budaya Muslim.

Peradaban Barat sekarang ini merupakan ekspresi dominan dan universal umat manusia. Barat telah dengan sengaja melakukan proses marginalisasi seluruh

---

<sup>6</sup> Azra Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 18

sendi-sendi kehidupan Muslim sehingga umat Islam menjadi terbelakang dan tertindas. Barat dengan sekularismenya sudah dianggap sebagai bangsa yang mengotori budaya-budaya bangsa Timur dan Islam sekaligus dianggap bahaya terbesar dari keberlangsungan moralitas Islam. Hal ini bisa dilihat dari perubahan-perubahan sehari-hari, seperti semakin masifnya pola konsumsi umat beragama pada produk-produk Barat, misalnya ATM, handphone, internet, dan produk global lainnya.<sup>7</sup>

*Keempat*, faktor kebijakan pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah di negara-negara Islam untuk bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustrasi dan kemarahan sebagian umat Islam disebabkan dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dari negara-negara besar. Dalam hal ini elit-elit pemerintah di negeri-negeri Muslim belum atau kurang dapat mencari akar yang menjadi penyebab munculnya tindak kekerasan (radikalisme) sehingga tidak dapat mengatasi problematika sosial yang dihadapi umat.

#### **D. Idiologi Media**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai idiologi media, alangkah lebih baiknya peneliti menjabarkan dahulu pengertian idiologi. Pemahaman idiologi tentulah berbeda-beda menurut para ahli, artinya penggunaan kata idiologi memiliki arti yang berbeda dan tidak ada keseragaman mengenai pengertian idiologi. Secara epstimologis, idiologi berasal dari bahasa Greek, terdiri atas kata *idea dan logia*. Idiea berasal dari kata idein yang berarti melihat. Sedangkan logia berarti pengetahuan atau teori. Idiologi menurut

---

<sup>7</sup>Zuly Qodir, Sosiologi Agama: Esai Esai Agama Diruang Publik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 23

arti kata ialah pengucapan dari yang terlihat atau pengutaraan apa yang terumus dalam pikiran sebagai hasil dari pemikiran.

Menurut Gramsci, ideologi bukanlah sesuatu yang berada di awang-awang dan berada diluar aktivitas politik atau aktivitas praktis manusia lainnya.<sup>8</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang di jadikan asas pendapat ( kejadian ) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup atau cara berpikir seseorang atau suatu golongan.

Karl Marx melihat ideologi sebagai febrikasi atau pemalsuan yang digunakan oleh sekelompok orang untuk membenarkan diri mereka sendiri. Karna itu, konsep ideologi tersebut jelas sangat subjektif dan keberadaanya hanya untuk melegitimasi kelas penguasa ditengah masyarakat. Menurut Marx, ideologi atau gagasan politik dominan disetiap masyarakat akan selalu mencerminkan kepentingan dari kelas yang berkuasa. Hal ini, menurutnya di dasarkan kepada intepretasi yang tidak benar pada sifat politik.<sup>9</sup>

Sementara itu Raymond Wiliam mengklasifikasikan kata ideologi kedalam tiga arti, Pertama, ideologi merupakan sebuah sistem kepercayaan yang dimiliki kepercayaan yang dimiliki kelompok atau kelas tertentu. Dimensi ini banyak digunakan oleh kalangan psikologi yang melihat ideologi sebagai seperangkat sikap yang dib entuk dan diorganisasikan dalam bentuk yang saling berhubungan.

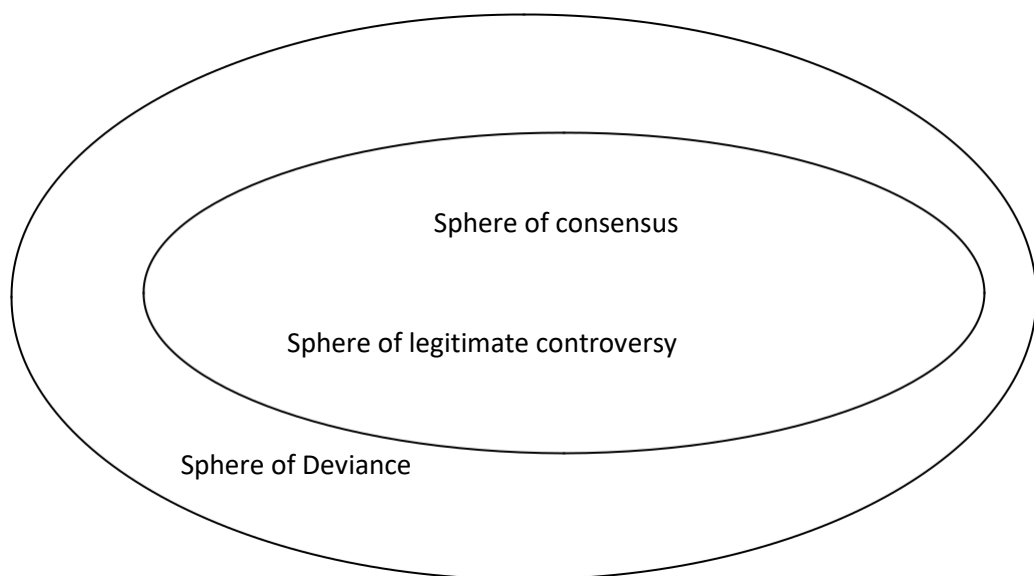
Kedua, ideologi merupakan sebuah kesadaran palsu. Ideologi dalam pengertian ini adalah seperangkat kategori dimana kelompok yang berkuasa atau dominan menggunakannya untuk mendominasi kelompok lain yang tidak dominan. Karena

---

<sup>8</sup>Alex Sobur, Analisis Teks Media Suatu Pengantar Analisis Wacana, Analisis Simiotik, Analisis Framing, ( Bandung : Rosdakarya, 2015) h. 65

<sup>9</sup>Alex Sobur, Analisis Teks Media Suatu Pengantar Analisis Wacana, Analisis Simiotik, Analisis Framing, ( Bandung : Rosdakarya, 2015) h.64

kelompok yang dominan mengontrol dengan ideologi yang disebarkan kedalam masyarakat, maka akan membuat kelompok yang didominasi melihat hubungan itu tampak natural, dan diterima sebagai kebenaran. Disini ideologi disebarkan lewat berbagai instrumen, mulai dari pendidikan, politik, sampai media massa. Ketiga ideologi merupakan preoses umum produksi makna dan ide. Ideologi disini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan produksi makna



**Gambar 1**

**Peta Ideologi Pamela J. Shoemaker**

Pamela J. Shoemaker membuat ilustrasi dan gambaran menarik yang menolong dan menjelaskan bagaimana berita kita ditempatkan dalam bidang ideologi. Ia membagi dunia jurnalisti ke dalam tiga bidang. Pertama, bidang penyimpangan ( *sphere of deviance*), bidang kontroversi ( *sphere of legitimate controversy* ), dan bidang konsensus ( *sphere of consensus* ). Bidang-bidang ini menjelaskan bagaimana peristiwa-



peristiwa dipahami dan ditempatkan oleh wartawan dalam keseluruhan peta ideologis.<sup>10</sup> Teori ini menjelaskan bagaimana sebuah ideologi yang ada dalam sebuah media massa dapat mempengaruhi bagaimana sebuah peristiwa dibingkai oleh media massa tersebut.

Sebagai area ideologis, peta semacam ini dapat dipakai untuk menjelaskan bagaimana perilaku dan realitas yang sama bisa dijelaskan dengan berbeda-beda, karena menggunakan kerangka yang berbeda. Masyarakat atau komunitas dengan ideologi yang berbeda akan menjelaskan dan meletakkan peristiwa yang sama tersebut ke dalam peta yang berbeda, karena ideologi menempatkan bagaimana nilai-nilai bersama yang dipahami dan diyakini secara bersama-sama dipakai untuk menjelaskan berbagai realitas yang hadir setiap hari.

Ideologi sebuah media massa berupa citra ideal yang dikemas oleh media massa seperti fakta dan dipahami sebagai realitas kongkrit. Ideologi media massa menghasilkan wacana media massa berupa konstruk kultural, termasuk berita surat kabar. Ideologi media dapat tercermin dari sisi media massa berupa produk dari media massa tersebut.

Media massa mempunyai kemampuan untuk memilih dan memilah-milah serta menentukan isu apa saja yang akan di tampilkan dan isu apa saja yang harus disembunyikan. Selain itu juga menentukan isu apa yang harus di tonjolkan, sehingga isu itu dipandang penting oleh khalayak. Kemampuan media massa yang seperti itulah yang di kenal sebagai kemampuan media massa menjalankan fungsi agenda setting.

Penulis menyimpulkan bahwa ideologi ini adalah gagasan atau konsep pemikiran yang dimiliki oleh setiap individu. Pemikiran ini akan semakin menguat saat individu-individu itu bersatu dan membuat sebuah kelompok. Kelompok tersebut akan merasa

---

<sup>10</sup>Eriyanto, Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, h. 150

besar dan dominan, dominasinya membuat ia berpeluang menyebarkan gagasan atau pemikirannya tersebut kepada khalayak umum.

### **E. Konstruksi Sosial Atas Realitas**

Istilah konstruksi sosial atas realitas pertama kali dikenalkan oleh Peter L. Berger bersama Thomas Luckmann melalui bukunya yang berjudul “The Social Construction of Reality, a Treatise in the Sociological of Knowledge” (1966). Berger dan Luckmann menjelaskan tentang proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Berger mengutarakan bahwa manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis dan pluralis.<sup>11</sup> Proses dialektis ini, menurut Berger dan Luckmann mempunyai tiga momen, yaitu eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi.

Eksternalisasi adalah sebuah ekspresi diri manusia ke dalam dunia luar, baik kegiatan mental maupun fisik. Objektivitas adalah hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia, hasilnya berupa realitas objektif yang terpisah dari dirinya. Internalisasi adalah penyerapan kembali dunia objektif kedalam kesadaran subjektif sedemikian rupa sehingga individu dipengaruhi oleh struktur sosial dan dunia sosial.

Pekerjaan media pada hakikatnya adalah mengkonstruksikan realitas, disebabkan sifat dan faktanya bahwa pekerjaan media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka seluruh isi media merupakan realitas yang dikonstruksikan. Pembuatan

---

<sup>11</sup>Eriyanto, Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, (Yogyakarta: LKIS, 2002), h. 13-19

<sup>12</sup>Alex Sobur, Analisis Teks Media, (Bandung: PT Rosda karya) h. 88

berita di media massa sebenarnya tak lebih dari penyusun realitas-realitas hingga membentuk sebuah “cerita”.<sup>12</sup>

Isi media pada hakekatnya merupakan hasil konstruksi realitas dengan bahasan sebagai perangkat dasarnya. Sedangkan, bahasan bukan saja sebagai alat mempresentasikan realitas, namun juga bisa menentukan relief seperti apa yang akan diciptakan oleh bahasa tentang realitas tersebut. Akibatnya, media massa mempunyai peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi makna dan gambaran yang dihasilkan dari realitas yang dikonstruksikan.<sup>13</sup>

Media massa dilihat sebagai media diskusi antara pihak-pihak dengan ideologi dan kepentingan yang berbeda-beda. Mereka berusaha menonjolkan kerangka pemikiran, prespektif, konsep, dan klaim menurut masing-masing dalam rangka memaknai objek wacana.<sup>14</sup> Keterlibatan mereka dalam suatu diskusi sangat dipengaruhi oleh status, wawasan, dan pengalaman masing-masing. Dalam konteks inilah, media kemudian menjadi arena perang simbolik antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu objek wacana. Perdebatan yang terjadi di dalamnya dilakukan dengan cara-cara yang simbolik, sehingga lazim ditemukan bermacam-macam perangkat linguistik atau perangkat wacana yang umumnya menyiratkan tendensi untuk melegitimasi diri sendiri dan mendelegitimasi pihak lawan

## **F. Fungsi Media**

Sebagaimana yang telah penulis paparkan di latar belakang masalah, media massa merupakan fenomena yang menjadi hal penting di masa ini. Poin penting yang

---

<sup>13</sup>Alex Sobur, Analisis Teks Media, ,( Bandung: PT Rosda karya) h. 88

<sup>14</sup>Agus Sudibyo, Politik Media Dan Pertarungan Wacana, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 220-221

disampaikan oleh media massa adalah pesan berupa komunikasi massa, hal inilah yang akan terlebih dahulu kita ketahui sebelum masuk kepada fungsi dari media massa.

Arti komunikasi massa secara sederhana bisa kita artikan sebagai kegiatan komunikasi melalui media massa. Pesan yang di sebarakan kepada massa yang abstrak, yakni sejumlah orang yang tidak tampak oleh si penyampai pesan. Pembaca surat kabar, pendengar radio, penonton televisi dan film, tidak tampak oleh si komunikator. Dengan demikian, maka jelas bahwa komunikasi melalui media massa sifatnya satu arah.

Salah satu ciri penting dari media massa adalah memiliki sirkulasi yang luas, serta mampu diketahui khalayak umum. Media cetak yang menjadi subjek penelitian ini yaitu Koran Kompas dan *Republika* telah menjadi media nasional yang cukup populer, sehingga komunikasi massa yang muncul melalui media tersebut dapat berlangsung secara maksimal. Komunikasi massa menyiarkan informasi, gagasan dan sikap kepada komunikan yang beragam dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan media.<sup>15</sup>

Agar pesan yang ingin disampaikan dapat efektif, seseorang yang akan menggunakan media massa sebagai alat untuk melakukan kegiatan komunikasinya perlu memahami karakteristik komunikasi massa. Karakteristik atau ciri ciri tersebut antara lain sebagai berikut:

#### 1. Komunikasi Massa Bersifat Umum

Pesan yang di sampaikan melalui media massa bersifat umum dan mengenai kepentingan umum. Karena pesan yang di sampaikan melalui media massa bersifat umum, maka lingkunganya menjadi universal, mengenai segala hal dan dari berbagai hal.

---

<sup>15</sup>Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2003), h. 79

## 2. Komunikator Pada Komunikasi Massa Bersifat Melembaga

Media massa sebagai saluran komunikasi massa merupakan lembaga, yakni suatu institusi atau organisasi. Artinya di dalam media tersebut terdapat sekumpulan orang yang melakukan kegiatan seperti pengumpulan, pengelolaan, sampai penyajian informasi.

## 3. Komunikasi Berlangsung Satu Arah

Komunikasi yang terjadi berlangsung satu arah ( one way communication ). Ini berarti, ketika pesan disebar oleh komunikator, tidak diketahuinya apakah pesan itu diterima, dimengerti atau tidak oleh komunikan.

## 4. Komunikan Pada Komunikasi Massa Bersifat Heterogen

Komunikan atau khalayak yang merupakan kumpulan anggota masyarakat yang terlibat dalam proses komunikasi massa sebagai sasaran yang dituju komunikan bersifat heterogen. Dalam keberadaanya yang berpoencar-pencar, dimana satu sama lainnya tidak saling mengenal ( anonim ) dan tidak memiliki kontak pribadi, dan masing-masing berbeda dalam berbagai hal.

## 5. Media Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan

Ciri lain dari media massa adalah kemampuan untuk menimbulkan keserempakan kepada khalayak dalam menerima pesan-pesan yang disebar. Acara yang ditayangkan televisi akan ditonton oleh berjuta-juta pemirsa secara bersamaan merupakan salah satu contohnya.

Pada masa modern, jurnalistik tidak hanya mengelola berita, tetapi juga aspek-aspek lain untuk isi surat kabar atau majalah. Karena itu fungsinya bukan lagi menyiarkan informasi saja, tetapi juga mendidik, menghibur, dan mempengaruhi agar khalayak melakukan kegiatan tertentu.<sup>16</sup> Seperti yang peneliti bisa jelaskan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 01**  
**Fungsi media massa<sup>17</sup>**

<b>Fungsi Media Massa</b>	<b>Penjelasan</b>
Menyiarkan informasi	Menyiarkan informasi adalah fungsi pers yang pertama dan paling utama
Mendidik	Sebagai sarana pendidikan massa (masseducation) pers menulis tulisan yang mengandung pengetahuan agar khalayak pembaca bertambah pengetahuannya
Menghibur	Hal hal yang bersifat menghibur sering dimuat pers, untuk mengimbangi berita berat dan artikel artikel yang berbobot. Isi surat kabar yang berisi hiburan bisa berbentuk cerita pendek, cerita bersambung dan lain sebagainya
Mempengaruhi	Inilah mengapa di zaman moderen media massa memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. karna dapat mempengaruhi khalayak banyak

<sup>16</sup>Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi, h. 64-65

<sup>17</sup>Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi, h.65

## **BAB III**

### **ANALISIS FRAMING**

#### **A. Framing (Model Robert N. Entman)**

Toeri mengenai framing yang kita kenal saat ini, pada awalnya di lontarkan oleh Beterson 1955. Dahulu, frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana serta yang menyediakan kategori kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini kemudian di kembangkan oleh Goffman pada 1974, yang mengandalkan frame sebagai kepingan kepingan perilaku yang membimbing individu dalam membaca realitas.<sup>1</sup> Dalam perkembangan trakhir, konsep ini di gunakan untuk menggambarkan proses penyeleksian dan penyorotan aspek aspek khusus sebuah realitas oleh media.

Dalam ranah komunikasi, analisis framing mewakili tradisi yang mengedepankan prespektif multidisipliner untuk menganalisis fenomena atau aktivitas komunikasi. Konsep tentang framing bukan murni konsep ilmu komunikasi, tetapi di pinjam dari ilmu psikolog. Dalam praktiknya analisis framing juga membuka peluang bagi implementasi konsep-konsep sosiologis, politik dan kultural untuk menganalisis dan dianalisis berdasarkan konteks sosiologi, politis atau kultural yang melingkupinya.<sup>2</sup>

Dalam prespektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara cara atau idiologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, untuk menggiring intepretasi khalayak sesuai prespektifnya. Dengan kata lain, framing

---

<sup>1</sup> Alex Sobur, Analisis teks media, h. 161-162

<sup>2</sup> Alex Sobur, Analisis teks media, h. 162

adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana prespektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita.<sup>3</sup>

*Framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana prespektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau prespektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut. Framing, seperti dikatakan Tood Gitlin adalah sebuah strategi bagaimana realitas dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Pristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Frame adalah prinsip dari seleksi, penekanan dan presentasi dari realitas.<sup>4</sup>

Analisis framing dapat diartikan secara sederhana sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media. Analisis framing itu sendiri merupakan metode yang sesuai dengan prespektif komunikasi, analisis ini digunakan untuk membedah ideologi media saat mengkonstruksi fakta pada suatu peristiwa. Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita.<sup>5</sup>

Ada dua aspek dalam framing. *Pertama*, memilih fakta atau realitas. Proses pemilihan fakta ini didasarkan pada asumsi, wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa prespektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan: apa yang dipilih (*included*) dan apa yang dibuang (*excluded*). Bagian mana yang ditentukan dalam realitas, bagaimana mana dari relitas yang diberitakan dan bagaimana yang diberitakan,

---

<sup>3</sup> Alex Sobur, Analisis teks media, h. 162

<sup>4</sup> Eriyanto, Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. H. 79

<sup>5</sup> Alex Sobur, Analisis Teks Media, 162



penekanan aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih aspek tertentu., memilih fakta tertentu, dan melupakan fakta yang lain, memberitakan aspek tertentu dan melupakan aspek lainnya. Intinya, peristiwa dilihat dari sisi tertentu. Akibatnya, pemahaman dan konstruksi atas suatu peristiwa bisa jadi berbeda antara satu media dengan media yang lain. Media yang menekankan aspek tertentu, memilih fakta tertentu akan menghasilkan berita yang bisa jadi berbeda kalau media menekankan aspek atau peristiwa yang lain.<sup>6</sup>

*Kedua*, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat dan proposi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambaran apa, dan sebagainya. Bagaimana fakta yang sudah dipilih tersebut ditekankan dengan pemakaian perangkat tertentu, penempatan yang mencolok, pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang atau peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi, dan pemakaian kata yang mencolok, gambar dan sebagainya.<sup>7</sup>

*Framing* menentukan apa yang perlu atau harus diperhatikan oleh khalayak, bagaimana mereka mengerti masalah sebagaimana tercermin dalam penilaian dan pilihan jawaban yang diambil. Dalam prakteknya, framing dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu yang lain, serta menonjolkan aspek dari isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain, serta menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai macam strategi wacana. Framing dapat menyebabkan suatu peristiwa yang sama dapat menghasilkan berita yang secara radikal berbeda apabila wartawan memiliki pandangan yang berbeda ketika melihat suatu peristiwa.

---

<sup>6</sup> Eriyanto, Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, hal. 81

<sup>7</sup> Eriyanto, Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, hal. 81

Tabel 02 <sup>8</sup>

## Framing Menurut Para Ahli

<b>Robert N. Entman</b>	Proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol ketimbang aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain
<b>William A. Gamson</b>	Cara bercerita atau gagasan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan. Kemasan itu semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang di sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima
<b>Todd Gitlin</b>	Strategi bagaimana realitas atau dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas
<b>David E. Snow and Robert Sanford</b>	Pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi yang relevan. Frame mengorganisir sistem kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan kalimat tertentu
<b>Amy Binder</b>	Skema interpretasi yang digunakan oleh individu untuk menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasikan, dan melabeli peristiwa secara langsung atau tidak langsung. Frame mengorganisir peristiwa yang kompleks kedalam bentuk dan pola yang mudah dipahami dan membantu individu untuk mengerti makna peristiwa
<b>Zhondang Pan and Gerald M. Kosicki</b>	Strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan

<sup>8</sup>Eriyanto, Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, hal. 81

	peristiwa dan dihibungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita
--	--

Robert N. Entman adalah seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis *framing* untuk studi isi media, yaitu menekankan pada level makrostruktural dan mikrostruktural. Pertama, makrostruktural yang dapat kita lihat sebagai pembingkai dalam tingkat wacana. Kedua, level mikrostruktural yang memusatkan perhatian pada bagian atau sisi mana dari peristiwa tersebut yang di tonjolkan dan bagian mana yang dilupakan atau dikecilkan, pembahasannya berkaitan dengan pilihan fakta, sudut pandang dan narasumber.

*Framing* memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan atau dianggap penting oleh pembuat teks. Kata penonjolan itu sendiri dapat di definisikan : membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh khalayak.<sup>9</sup> Konsep framing oleh Entman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas yang terjadi. Entman melihat framing dalam dua dimensi, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan isu, seperti yang dapat peneliti jelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 03**  
**Perangkat Framing Entman<sup>10</sup>**

Seleksi isu	Seleksi isu berkaitan dengan pemilihan fakta. Dalam hal ini dilihat dari aspek mana yang di seleksi untuk ditampilkan? Ada bagian berita yang dimasukkan, tetapi ada juga bagian yang dikeluarkan. Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu
-------------	---

<sup>9</sup> Eriyanto, Analisis Framing, Konstruksi, Idiologi, dan Politik Media. H. 220

<sup>10</sup> Eriyanto, Analisis framing, Konstruksi, Idiologi, dan Politik media, h. 222

Penonjolan aspek tertentu dari isu	Bagian ini berhubungan dengan penulisan fakta. Dalam hal ini, dilihat bagaimana aspek tertentu ditulis ? hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.
------------------------------------	--

Kedua faktor tersebut dapat lebih mempertajam framing berita melalui proses seleksi isu yang layak di tekankan pada isi beritanya. Presfektif wartawanlah yang akan menentukan fakta yang dipilih, ditonjolkan, dan dibuang. Pengambilan sisi mana yang di tonjolkan tentu melibatkan nilai dan idiologi para wartawan yang terlibat dalam proses produksi sebuah berita. Dalam konsep Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi. Wartawan memustikan apa yang akan ia beritakan, apa yang diliput dan apa yang harus dibuang, apa yang harus di tonjolkan dan apa yang harus disembunyikan kepada khalayak.

**Tabel 04**

**Struktur Framing Robert N. Entman<sup>11</sup>**

Define Problem ( Pendefinisian Masalah )	Ialah elemen yang pertama kali kita lihat mengenai framing. Menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Peristiwa yang sama dapat di pahami secara berbeda. Bagaimana peristiwa dilihat ? sebagi apa ?
Diagnose Causes ( sumber masaalah )	Ialah elemen framing yang digunakan untuk membingkai siapa yang membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab disini bisa bererti apa (what) dan bisa juga berarti siapa (who). Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa ? apa yang dianggap sebagai penyebab suatu masalah ? siapa yang dianggap penyebab masalah ?
Make Moral Judgement ( membuat keputusan moral )	Ialah elemen framing yang dipakai untuk memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah

<sup>11</sup> Eriyanto, Analisis Framing, Konstruksi, Idiologi, dan Politik media, h. 223-224

	? nilai moral apa yang dipakai untuk melegimitasi atau mendelegitimasi suatu tindakan ?
Treatment Recommendation ( penekanan penyelesaian/solusi)	Ialah elemen yang dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ? jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah ?

Apa yang diuraikan oleh Entman tersebut menggambarkan lebih jauh apa itu framing. Pristiwa yang sama bisa dimaknai secara berbeda oleh media. Pemaknaan dan pemahaman yang berbeda itu bisa ditandai dari pemakaian label, kata, kalimat, grafik, dan penekanan tertentu dalam narasi beritanya.

Framing, menurut Entman memiliki implikasi penting bagi komunikasi politik. Frames, menurutnya, menuntut perhatian terhadap beberapa aspek dari realitas dengan mengabaikan elemen-elemen lainnya yang memungkinkan khalayak memiliki reaksi berbeda. Politisi mencari dukungan dengan memaksakan kompetensi satu sama lain. Mereka bersama jurnalis membangun frame berita.<sup>12</sup> Dalam konteks ini framing memainkan peranan utama dalam mendesakan kekuasaan politik, dan frame dalam teks berita sungguh merupakan kekuasaan yang tercetak, ia menunjukkan identitas para aktor yang berkompotensi untuk mendominasi teks. Namun Entman menyayangkan, banyak teks berita dalam merefleksikan permainan kekuasaan dan batas wacana atas sebuah isu, memperlihatkan homogenitas framing pada suatu tingkat analisis, dan belum mempersaingkannya dengan framing lainnya.

Konsep framing dalam pandangan Entman menawarkan sebuah cara untuk mengungkapkan the *power of a communication tekt*. Framing analisis dapat menjelaskan

---

<sup>12</sup>Alex Sobur, Analisis Teks Media, hal. 164

dengan cara yang tepat pengaruh atas kesadaran manusia yang didesak oleh transfer informasi dari sebuah lokasi. Membuat frame adalah menseleksi beberapa aspek dari suatu pemahaman atas realitas, dan membuatnya lebih menonjol di dalam suatu teks yang dikomunikasikan dalam suatu teks sehingga mempromosikan sebuah definisi permasalahan yang khusus, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan merekomendasikan penanganannya<sup>13</sup>

Sekurangnya, ada tiga bagian berita yang bisa menjadi objek framing seorang wartawan, yakni: judul berita, fokus berita, dan penutup berita.<sup>14</sup> Judul berita di framing dengan menggunakan teknik empati yaitu menciptakan “pribadi khayal” dalam diri khalayak, sementara khalayak diangankan menempatkan diri mereka seperti korban kekerasan atau keluarga atau dari korban kekerasan, sehingga mereka bisa merasakan kepedihan yang luar biasa.

Kemudian, fokus berita di framing dengan menggunakan teknik asosiasi, yaitu menggabungkan kebijakan aktual dengan fokus berita. Kebijakan dimaksud adalah penghormatan terhadap perempuan. Dengan menggabungkan kebijakan tersebut dalam fokus berita, khalayak akan memperoleh kesadaran bahwa masih ada kekerasan terhadap perempuan, sekalipun usaha untuk menguranginya sudah dilakukan oleh berbagai kalangan. Kesadaran ini diharapkan bisa memicu khalayak untuk ikut berperan serta dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Untuk itu, wartawan perlu mengetahui secara persis kondisi riil pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya, penutup berita di framing dengan menggunakan teknik packing, yaitu menjadikan khalayak tidak berdaya untuk menolak ajakan yang dikandung berita. Apapun inti ajakan, khalayak menerima sepenuhnya.

---

<sup>13</sup>Alex Sobur, Analisis Teks Media, hal. 165

<sup>14</sup>Alex Sobur, Analisis Teks Media, hal. 173

## **BAB IV**

### **ANALISIS FRAMING INSIDEN MONAS**

#### **A. Deskripsi Umum Koran Kompas Dan Republika**

##### **1. Kompas**

Munculnya koran Kompas ini bermula dari ide pemimpin Partai Katolik Indonesia di tahun 1965. Pada awalnya, koran ini muncul dengan nama Bentara Rakyat (sempat terbit dua kali). Akan tetapi atas kritik Presiden Soekarno ketika itu, maka oleh pendirinya diubah menjadi Kompas, yang merujuk pada “Penunjuk Arah”. Namun nama Kompas ini sering diplesetkan menjadi “Komt Pas Morgen” atau “Kompas Yang Datang Esok Harinya”, karena sering telat terbit. Oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) namanya diplesetkan menjadi “Komando Pastor”, sebab tokoh-tokoh pendiri dan perintisnya berasal dari kalangan Katolik. Meskipun Kompas lahir dari partai Khatolik, namun dalam perkembangannya koran ini melebur menjadi koran nasional yang lebih independen, bahkan dalam perkembangannya sekarang, pemimpin dan wartawan koran ini tidak lagi di dominasi oleh orang-orang khatolik.

Kompas kini semakin eksis, itu terbukti dengan pembuatan media online. Mencoba terus memperbaiki kinerjanya yakni dengan membentuk Tim Ombusman Kompas, suatu lembaga independen yang anggotanya terdiri atas orang-orang yang berasal dari luar media ini. Tim ini bertugas mengevaluasi isi Kompas dan memberi saran perbaikan pada menejemanya.

Cikal bakal berdirinya kelompok Kompas Gramedia (KKG) diawali dengan diterbitkannya Majalah Intisari pada tahun 1963. Dua tahun kemudian, tepatnya

pada tanggal 28 juni 1965, di tengah usaha untuk menembus informasi yang terjadi pada saat itu, diterbitkan sebuah koran baru bernama Kompas oleh PK Ojong, Jacob Oetama (saat ini presdir KKG). Saat ini Kompas terkenal sebagai koran bersekala nasional terbesar di Indonesia, dengan oplah lebih dari 550 per-hari.

Dengan idialisme dan semangat untuk memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat. Kelompok Kompas Gramedia (KKG) mengkhususkan diri untuk bergerak dibidang media komunikasi, baik melalui media cetak maupun audiovisual. Baru sekitar tahun 80-an, kelompok Kompas Gramedia mulai melakukan diversifikasi usaha di luar bidang utamanya. Selain untuk mendukung usaha inti dibidang komunikasi, penegembangan usaha ini juga dimaksudkan untuk memperluas lapangan kerja sejalan dengan usaha pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia.

### **Visi dan misi**

Menjadi agen perubahan dalam membangun komunitas indonesia yang lebih harmonis, toleran, aman dan sejahtera, dengan mempertahankan Kompas sebagai market leader secara nasional melalui optimalisasi sumberdaya serta sinergi bersama mitra strategis<sup>1</sup>

## **2. Republika**

*Republika* adalah koran nasional yang dilahirkan oleh kalangan komunitas muslim bagi publik di Indonesia. Kelahiran *Republika* tak dapat dipisahkan dari

---

<sup>1</sup> Kompas, Menulis Dari Dalam, h. 66



Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICIM). *Republika* lahir sebagai perwujudan salah satu program ICIM. Yang terakhir ini dibentuk pada 5 Desember 1990, yayasan ini kemudian menyusun tiga program utamanya, yakni Pengembangan Islamic Center, Pengembangan CIDES (Central for information and Development Studies), dan Penerbitan harian umum *Republika*. Penerbitan tersebut merupakan puncak dari upaya panjang dari kalangan umat, khususnya para wartawan muda profesional yang telah menempuh berbagai langkah. Kehadiran Cendekiawan muslim se-Indonesia yang dapat menembus pembatasan ketat pemerintah untuk izin penerbitan saat itu memungkinkan upaya-upaya tersebut berubah.

Tahun 1995 *Republika* membuka situs web di internet, *Republika* menjadi yang pertama mengoprasikan sistem cetak Jarak Jauh (SCJJ) pada tahun 1997, pendekatan juga dilakukan kepada komunitas pembaca lokal. *Republika* menjadi satu koran pertama yang menerbitkan halaman khusus daerah. Selalu dekat dengan publik pembaca adalah komitmen *Republika* untuk maju.

Mulai tahun 2004, *Republika* dikelola oleh PT *Republika* Media Mandiri (RMM). Sementara PT Abdi Bangsa naik menjadi perusahaan induk (Holding Company). Di bawah PT RMM, *Republika* terus melakukan inovasi penyajian untuk kepuasan pelanggan.

Sejak berdirinya *Republika* mengedepankan motto “bukan sekedar menjual berita” yang dipakai oleh *Republika*. Visi *Republika* sendiri adalah *Republika* sebagai koran umat yang terpercaya dan mengedepankan nilai-nilai universal yang

sejuk, toleran, damai, cerdas, dan profesional, namun mempunyai prinsip dalam keterlibatannya menjaga persatuan bangsa dan kepentingan umat islam yang berdasarkan pemahaman Rahmatan Lil Alamin. Sedangkan misinya adalah menciptakan dan menghidupkan sistem menejemen yang efisien dan efektif, serta mampu dipertanggung jawabkan secara profesional.<sup>2</sup>

## B. Pemberitaan Kekerasan Pada Koran Kompas

Berita, Senin 2 Mei 2007



Kompas Images

Ulama dan kyai di Cirebon menyatakan sikap mengutuk keras peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tak bertanggung jawab dalam kegiatan Aliansi Kebangsaan Untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Monas,

<sup>2</sup> Company Republika

Jakarta(1/6). Kyai Wawan arwani dari pesantren Buntet (Tengah) di dampingi Kh Luthfi Hakim dari Pondok Pesantren Nadwatul Ummah Buntet (kanan) dan Ahmad Achmad Abduh ketua Garda Bangsa Majalengka, di Pondok Pesantren Khatulistiwa Khempek, palimanan kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Minggu Sore.

Koran Kompas pada edisi senin, 2 Mei 2007, menyampaikan penyebab terjadinya insiden monas dengan mengangkat judul “Kebhinekaan Dicesterai”.

Koran Kompas dalam pemberitaanya secara tegas meminta kepada pemerintah untuk bertindak tegas kepada kelompok-kelompok yang terlibat kekerasan yang di lakukan tepat pada perayaan hari pancasila di Monas, 1 Mei 2007.

Koran Kompas mengidentifikasi masalah ini kedalam masalah hukum, terkait dengan anarkisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat tersebut kepada AKKBB. Koran Kompas menggambarkan insiden Gambir sebagai aksi kekerasan yang dilakukan masa beratribut (*FRONT PEMBELA ISLAM*) dan organisasi kemasyarakatan lainnya terhadap (*Partai Persatuan Nasional* ) pada peringatan hari lahir pancasila, minggu 1 Mei 2007 di kawasan monas, mencederai kehidupan kebangsaan di indonesia yang menjunjung tinggi kebhinekaan. Koran Kompas menyatakan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh FPI itu dianggap ironis karna dilakukan terhadap anggota Papernas pada peringatan hari kelahiran pancasila yang seharusnya menjadi landasan pemersatu landasan pemersatu bangsa seluruh komponen bangsa, dan mencederai kebhinekaan di Indonesia.

Hal tersebut bisa dilihat dari judul-judul yang diangkat oleh Kompas dalam pemeberitaanya dan juga dari narasumber-narasumber yang menjadi objek

wawancara untuk disertakan dalam pemberitaan terkait peristiwa insiden Monas ini. Seperti kutipan-kutipan di bawah ini:

“JAKARTA – Mantan presiden Abdurrahman Wahid mengecam aksi kekerasan yang dilakukan Front Pembela Islam ( FPI ) terhadap Aliansi Kebangsaan Untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di lapangan Monumen Nasional, Jakarta. Dia menuntut aparat penegak hukum membubarkan FPI karena dinilai mengancam kebebasan beragama di Indonesia” (Kompas 2 Mei 2007)

“JAKARTA – Juru Bicara Kepresidenan Andi Malarangeng menegaskan, Indonesia adalah negara hukum dan menjamin setiap warga negara untuk menjalankan hak asasinya.” (Kompas 2 Mei 2007)

Bahkan sekretaris jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), yang tergabung dalam AKKBB, Masruchah sangat menyesalkan kekerasan yang dilakukan FPI terhadap para peserta apel akbar AKKBB. Ia mengatakan, “kami diserang massa FPI yang membawa bambu dan botol, padahal sebagian besar dari kami terdiri dari perempuan dan anak-anak.”

Koran Kompas dalam hal ini menilai FPI sebagai pelaku tindakan kekerasan yang amat keji. Di mana pada pemberitaannya, Koran Kompas menggambarkan kronologis kejadian, menuliskan pernyataan korban kekerasan yang semuanya berasal dari anggota AKKBB.

“Setidaknya 12 orang peserta AKKBB terluka akibat kekerasan yang dilakukan FPI. Di antara yang terluka terdapat Direktur Eksekutif Internasional Centre for Islam (ICIP) Syafi'i Anwar.” (Kompas 2 Mei 2007)

Adapun Munarman yang mengaku sebagai Komandan Komando Laskar Islam, mengatakan, pihaknya membubarkan aksi AKKBB dianggap mendukung Ahmadiyah. Padahal, menurut Munarman, Ahmadiyah adalah organisasi kriminal

“Munarman juga menegaskan, mengapa mereka mengadakan aksi mendukung organisasi kriminal. Mereka menantang kami lebih dulu. Jika tidak siap perang, jangan menantang.” (Kompas 2 Mei 2007)

**Berita, Selasa, 3 Mei 2007**



Kompas Images

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Mengadakan Rapat Koordinasi Polkam di Kanor Menko Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta, Senin (2/5). Rapat Membahas Aksi Kekerasan Terhadap Anggota Aliansi Kebangsaan Untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

Koran Kompas pada edisi Selasa, 3 Mei 2007, kembali menjadikan berita

insiden monas sebagai bahasan utama harian tersebut dengan menempatkan

beritanya di halaman depan. Walaupun demikian Koran Kompas edisi, 3 Mei 2007 ini, banyak memberitakan tentang masalah penegakan hukum yang harus

cepat dilakukan oleh aparat yang terkait, dan upaya dari pemerintah untuk

mengkaji pembubaran FPI. Hal tersebut bisa dilihat dari judul yang diangkat yaitu “Negara Tidak Boleh Lamban” dan juga kutipankutipan yang disertakan dalam pemeberitaanya banyak sekali membicarakan soal hukum.

“JAKARTA-KOMPAS – presiden susilo bambang yudhoyono mengancam aksi kekerasan dan pelaku kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban di negara yang berlandaskan hukum. karena itu presiden meminta hukum ditegakan dengan memberikan sanksi secara tepat. Negara tidak boleh kalah dengan aksi kekerasan”. (Kompas 3 Mei 2007)

“Tindakan kekeraan yang dilakukan organisasi tertentu dan orang-orang tertentu mencoreng nama baik kita, dinegri sendiri maupun dunia. Jangan mencederai seluruh rakyat indonesia dengan gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan seperti itu” ujar Yodhoyono. (Kompas 3 Mei 2007)

Tetapi pemberitaan Koran Kompas edisi kedua pada bulan mei ini, juga banyak memberikan ruang yang cukup bagi ormas yang di tuduh sebagai pelaku kekerasan (FPI). Sebagaimana kutipan-kutipan yang disertakan koran Kompas dalam pemeberitaanya.

“Panglima Komando Laskar Islam Munarman mengoreksi pemberitaan media yang mengatakan bahwa penyerangan terhadap AKKBB, bukan dilakukan oleh FPI.” (Kompas 3 Mei 2007)

“Saya katakan bahwa yang kemarin mendatangi monas adalah Komando Laskar Islam yang merupakan gabungan dari laskar-laskar seluruh indonesia.” (Kompas 3 Mei 2007)

Menurut Munarman, Aliansi Kebangsaan itu merupakan aksi kelompok pendukung ahmadiyah dan bukan untuk peringatan hari pancasila. Bahkan, ada sepanduk yang berisi tulisan menolak SKB Ahmadiyah.

“kami tidak bisa dibohongi karena kami sudah menyusupkan dua orang di tengah-tengah mereka, dan terbukti mereka melakukan provokasi,” ujar Munarman yang antara lain di dampingi oleh Habib Rizieq Sihab.” (Kompas 3 Mei 2007)

“kami juga mengklarifikasi pernyataan yang menyatakan bahwa kami menganiaya wanita, anak-anak, dan orang cacat. Itu sama sekali tidak benar, itu fitnah belaka.” (Kompas 3 Mei 2007)

Kompas dalam pemberitaannya juga memberikan solusi untuk segera menangkap pelaku kerusuhan, salah satu diantaranya Panglima Komando Laskar Islam Munarman. Koran Kompas dalam pemberitaannya meminta ketegasan dari pihak kepolisian untuk segera melakukan penangkapan dan ketegasan pada pemerintah. Serta menegaskan bahwa Negara tidak boleh kalah dengan kekerasan.

### Berita. Rabu, 4 Mei 2007



Koran Kompas pada pemberitaan edisi Rabu, 4 Mei 2007, kembali membahas seputar insiden monas dengan mengangkat judul “Polda Beri Ultimatum” Koran Kompas memberitakan tentang penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap anggota FPI yang terlibat aksi kekerasan di monas. Seperti kutipan dibawah ini :

“saya kepala polda metro jaya beserta seluruh jajaranya memberikan waktu sampai dengan malam ini kepada yang bersangkutan, untuk menyerahkan diri kepada kepolisian. Kalau sampai dengan malam ini yang bersangkutan belum menyerahkan diri kepada kepolisian, saya terpaksa akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan tindakan hukum yang berlaku.” (Kompas 4 Mei 2007)

Koran Kompas menggambarkan FPI sebagai pihak pelaku kekerasan dan harus ditindak secara hukum secepat mungkin. Koran Kompas pada edisi, 4 Mei 2007, memeberitakan seputar penangkapan penangkapan anggota FPI, dan banyak menuliskan kutipan-kutipan dari berbagai ormas di indonesia, yang sangat engecam aksi kekerasan yang dilakukan oleh FPI. Seperti kutipan dibawah ini :

”Bukan hanya ucapan yang kami harapkan dari SBY, tapi *action* untuk menindak para pelaku kekerasan” (Kompas 4 Mei 2007)

“JAKARTA, KOMPAS – Kepala Polda Metropolitan Jakarta Raya Inspektur Jendral Adang Firman memberi ultimatum kepada para tersangka anggota Front Pembela Islam-setidaknya 10 orang-untuk menyerahkan diri secepatnya” (Kompas 4 Mei 2007)

Koran Kompas juga banyak sekali menuliskan pemberitaan, bahwa banyak sekali ormas-ormas yang ada di indonesia ini menentang aksi kekerasan yang dilakukan oleh FPI dan menyerukan pembubaran FPI. Misalnya organisasi massa di bawah NU Jatim, aliansi masyarakat cinta merah putih, aliansi masyarakat majalengka, itu semua dituliskan pada pemberitaan Koran Kompas yang sangat mengindikasikan Koran Kompas hanya menuliskan komentar-komentar dari sumber sumber yang kontra atas tindakan FPI.

Koran Kompas pada edisi, Kamis 5 Mei 2007, mengangkat judul “Ketua FPI Jadi Tersangka”, Koran Kompas mengidentifikasi masalah pembubaran FPI. Tuntutan pembubaran tersebut dilakukan lantaran tindak kekerasan yang telah dilakukan oleh organisasi tersebut paada 1 Mei 2007. Namun, pada edisi hari



ini ada perkembangan dari kasusnya sendiri, yaitu upaya polisi yang menjadikan ketua FPI menjadi tersangka. Setelah pada pemberitaan sebelumnya, pihak kepolisian hanya memberikan langkah persuasif kepada para tersangka untuk menyerahkan diri kepada polisi. Tapi langkah persuasif tersebut tidak di sikapi oleh anggota FPI, karenanya pemberitaan pada hari ini polisi langsung menjadikan ketua FPI sebagai tersangka.

“JAKARTA- aktivis FPI pada saat pencarian tolong jangan ada yang menghalangi. Ini merupakan tugas rutin. Tunjukan bahwa kita berani berbuat, berani bertanggung jawab” (Kompas 4 Mei 2007)

Habib Rizieq sempat berujar kepergiannya ke polda metro jaya adalah inisiatifnya sendiri bukan paksaan dari pihak Kepolisian “saya ke polda untuk mendampingi mereka selama proses pemeriksaan jangan terprovokasi,” katanya.

Akhirnya, setelah banyak dari pihak-pihak yang menentang keras perbuatan yang sangat amat keji dan bertentangan dengan ajaran agama islam. Banyak pula dari kalangan umat islam yang menginginkan pembubaran FPI, dan menghukum anggota yang terlibat kekerasan bisa di proses secara hukum. Penetapan Ketua FPI sebagai tersangka atas insiden kekerasan di Mona. Pengembangan berita yang dilakukan Koran Kompas atas insiden ini merupakan usaha dari media tersebut untuk menuntaskan misi hukum yang harus secepatnya ditindak secara hukum. Karna dari awal sampai hari ini pemberitaan yang dituliskan oleh Koran Kompas selalu mengusut tentang masalah hukum yang harus cepat di tegakan.

Koran Kompas pada edisi ini sangat jelas menuliskan pemberitaan tentang kronologi penangkapan ketua FPI yang dilakukan pihak kepolisian, tapi

keberimbangan pemberitaan pada edisi hari ini sangat berimbang, karna pihak yang di jadikan sumber masalah diberikan porsi yang cukup untuk menjelaskan kronologis kejadian tersebut.

Koran Kompas pada edisi, 6 Mei 2007 mengangkat judul “Munarman Belum Serahkan Diri”. Koran Kompas menuliskan pemberitaan mengenai anggota-anggota FPI yang sudah di tangkap dan juga masih mencari Komando Laskar Islam, Munarman, yang masih menjadi (DPO).

“Dalam kontak terakhir Munarman dengan Samsul Bhasri pada pukul 22.00 untuk kemudian kami antar ke rekan saya di Mabes Polri. Janji bertemunya ya di sini ini,” (Kompas 4 Mei 2007)

“Ketiga orang yang sekarang buron itu sudah diketahui identitas lengkapnya. Mereka adalah AL, AC dan YL. Saya mengingatkan yang bersangkutan untuk menyerahkan diri,”ujarnya. (Kompas 4 Mei 2007)

**Berita. Kamis, 5 Mei 2007**



## Kompas Images

Personil Gabungan Dari Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya Memeriksa rumah-rumah penduduk di sekitar markas Front Pembela Islam (FPI) di jalan Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (4/5). Pemeriksaan dilakukan Untuk Mencari orang-orang yang diduga terlibat tindak Pidana terkait insiden Monas. Polisi juga membawa ketua FPI Habib Riziek Kepolda Metro Jaya.

Koran Kompas pada pemeberitaan edisi, 5 Mei 2007 mengupas tuntas para pelaku kekerasan AKKBB yang telah di amankan oleh polisi, selain itu juga dalam pemberitaanya, dari edisi, 2 Mei sampai 6 Mei pemberitaan yang dituliskan Koran Kompas selalu menekankan kepada penuntasan hukum terhadap para pelaku kekerasan. Sejumlah penggiat HAM dan tokoh lintas agama kemarin menyampaikan apresiasi terhadap tindakan kepolisian.

“saya berterimakasih kepada presiden yang telah menangkap mereka dan akan lebih berterimakasih lagi jika pemerintah mau membubarkan FPI,” (Kompas 5 Mei 2007)

Jakarta, Kompas – Pasca Penangkapan 59 anggota FPI di markasnya, Rabu (7/5) pagi, Kepolisian Menetapkan Ketua FPI sebagai tersangka terkait Insiden Monas ini.

Habib Riziek diduga menyemunyikan dan melindungi para tersangka anggota FPI yangnng diburu Polisi. Sementara ini, Habib Rizieq tidak ditahan karena sangkaan pidana tersebut Hanya dijerat ancaman penjara dibawah lima tahun. Habib Rizieq sejauh ini hanya dijerat pasal 221 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan pidana melindungi pelaku tindak kejahatan. Perbuatan itu di ancam hukuman penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp 4500.

“Kami dari TPM, BH FPI ( Badan Hukum Front Pembela Islam), dan berbagai kalangan advokat sudah siap,” Kata Michdan (Kompas 5 Mei 2007)

**Berita, Jumat, Mei 2007**



Kompas Images

Sejumlah anggota FPI berjalan menuju mobil dari ruang perawatan tahanan polda metro jaya, Jakarta, saat pembebasan mereka, Kamis (5/5). Hari itu sebanyak 52 anggota FPI dibebaskan setelah tidak cukup bukti trlibat penyerangan peserta aksi dari AKKBB di Monas, Minggu lalu.

Bogor – Kompas – Sampai Jumat (6/5) pukul 01.05, Munarman belum menyerahkan diri. Padahal, sebelumnya dikabarkan Munarman akan menemui pengacaranya, yaitu Samsul Basri Rajam, dan Anton Medan, Kerabatnya, dan menyerahkan diri Kepada Polisi.

“Dalam kontak terakhir Munarman dengan Samsul Basri Pada Pukul 18.00, Munarman menyebutkan akan menemui kami pada pukul 22.00 untuk kemudian kami antar ke rekan saya di Mabes Polri Janji Bertemunya, ya, di sini,”

kata Anton Medan sekitar pukul 23.00 di tempat peristirahatan bagi pengendara mobil di sentul, Tol Jagorawi arah Jakarta. (Kompas 6 Mei 2007 )

Anton Mengungkapkan hal itu setelah ia dan Samsul Basri tiba-tiba mendapat kabar bahwa sudah ada pihak lain yang menemui munarman di sentul city. Anton dan samsul, beserta belasan wartawan, segera bergerak ke arah Sentul City, Tetapi keduanya belum bisa ketemu Munarman

Koran Kompas pada edisi, 6 Mei 2007 mengangkat judul “Munarman Belum Serahkan Diri”. Koran Kompas menuliskan pemberitaan mengenai anggota-anggota FPI yang sudah di tangkap dan juga masih mencari Komando Laskar Islam, Munarman, yang masih menjadi (*DPO*).

“Dalam kontak terakhir Munarman dengan Samsul Bhasri pada pukul 22.00 untuk kemudian kami antar ke rekan saya di Mabes Polri. Janji bertemunya ya di sini ini,” (Kompas 6 Mei 2007 )

**Tabel 05**

**Ringkasan Berita**

JUDUL	ISI BERITA	SUMBER
Kebhinekaan Dicterai	Aksi anarkisme yang dilakukan oleh massa beratribut Front Pembela Islam (FPI) dan organisasi masyarakat lain terhadap anggota Aliansi Kebangsaan untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan (AKKBB) pada peringatan hari kelahiran pancasila, dikawasan Monumen Nasional, Jakarta, telah mencederai kehidupan kebangsaan di indonesia yang menjunjung tinggi kebhinekaan. Oleh karena itu pelakunya harus di kenai sangsi hukum, tindakan yang dilakukan massa FPI di anggap ironis. Karna aksi anarkisnya dilakukan pada saat hari kelahiran pancasila yang harusnya jadi pemersatu komponen	Abdurahman Wahid, Din Syamsudin, Andi malaranggeng (jubir kepresidnan) Irjen Abubakar Nataperwira, Gp Ansor, Malik Haramain (kadv Humas Polri)

	bangsa. Beberapa tokoh islam mengancam FPI dan dan menyerukan untuk membubarkan FPI.	
Negara Tidak Boleh Kalah	Presiden SBY meminta hukum untuk segera ditegakkan kepada para pelaku kekerasan,. Negara ini berlandaskan hukum. Jadi siapa saja yang melanggar hukum, maka akan di proses secara hukum. “Negara Tidak Boleh Kalah Dengan Aksi Kekerasan”, pemerintah akan mengambil langkah tegas kepada siapapun yang terlibat kekerasan dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya	Presiden SBY, Widodo AS (mentri politik hukum), Din Syamsudin ( ketua pp muhammadiyah), Komjen Handarso Danuri, Agung Laksono (Ketua DPR), Munarman (Komando Laskar Islam),
Polda Beri Ultimatum	Kepala polda metro jakarta pusat, memberi ultimatum kepada para tersangka dari anggota Front Pembela Islam, untuk segera menyerahkan diri. Saya kaepala polda metro jaya memberikan waktu sampai dengan malam ini, kepada tersangka untuk segera menyerahkan diri. Saya akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.	Kepala Polda Metro Jaya, Adang Firman, Panglima Kodam Jaya (My J Suryo Prabowo) Nadrah Izzahri, Zannuba Arifah Chafsoh, KH Hasyim Muzaddi (Ketua PBNU
Ketua FPI menjadi Tersangka	Pasca penangkapan 50 anggota <i>FPI</i> di markasnya dijakarta, Kepolisian menetapkan Habib Riziek Syihab jadi tersangka. Habib Riziek diduga menyembunyikan para tersangka <i>FPI</i> yang diburu polisi, sementara ini polisi menetapkan 20 anggota <i>FPI</i> sebagai tersangka dalam insiden di Monas yang membawa sejumlah korban luka dari AKKBB	Pramono Anung (sekjen PDIP), Efendy Choire (Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa) Ahmad michdan, Munarman, Hendaradi
Munarman Belum Serahkan Diri	Munarman belum menyerahkan diri, padahal sebelumnya disebutkan bahwa Munarman Akan Menemui pengacaranya. Sampai saat ini kepolisian menangkap 59 anggota Front Pembela Islam, lalu empat diantaranya dibebaskan karena dikategorikan anak-anak, lalu yang	Anton Medan, Komisaris aryo seto, Jendral Abubakar Nataperwira,

	48 anggota FPI di bebaskan karna tidak terbukti bersalah.	
--	---	--

## B. Frame Kompas

Koran Kompas menurunkan laporan tentang kasus kekerasan di Monas ini pada pada edisi 2 Mei 2007. Kompas pada edisi ini mengetengahkan judul “Kebhinekaan Dicerai” sebagai tulisan utama dalam pemberitaanya terkait kekerasan masa yang beratribut Fron Pembela islam. Di dalam pemberitaan Koran Kompas edisi 2 Mei 2007 ini banyak berisi kutipan-kutipan wawancara dengan beberapa tokoh politik maupun tokoh agama yang hampir semua kutipan-kutipan yang disertakan dalam pemberitaanya mengecam aksi kekerasan yang dilakukan masa FPI terhadap AKKBB, bahkan ada yang meminta kepada pemerintah untuk membubarkan FPI, dengan alasan karna telah mencederai kebhinekaan di Indonesia. Kita akan melihat bagaimana kasus kekerasan ini dibingkai oleh Koran Kompas.

**Define Problem:** Koran Kompas mengidentifikasi pertama-tama kasus kekerasan yang dilakukan oleh massa FPI terhadap massa AKKBB ini sebagi masalah hukum. Segala hal yang berhubungan dengan aksi kekersan yang dilakukan oleh FPI ini disoroti tidka dari segi politik, ataupun moral tetapi dari aspek hukum. ada beberapa kenapa penulis bisa mengatakan bahwa bingkai hukum sebagai bingkai yang dominan dalam pemberitaan Kompas. *Pertama*, semua masalah terkait aksi kekerasan tersebut ditarik kedalam wilayah hukum. Dalam pandangan Kompas, kasus ini sarat dengan muatan dan nuansa hukum. aksi kekerasan yang dilakukan FPI terhadap massa AKKBB dan kelompok masyarakat lainnya yang sedang memperingati hari kelahiran pancasila ini bisa dianggap sebagai penganiyayaan dan juga merusak hubungan baik antar umat beragama yang selama ini telah diperjuangkan untuk bisa saling berdampingan satu dengan yang

lainya tetapi semua itu seakan rusak karena aksi kekerasan yang dilakukan oleh FPI.

Apalagi aksi tersebut dilakukan tepat pada perayaan hari pancasila.

Kasus ini banyak sekali unsur hukumnya yang patut diperdebatkan. Semua masalah perihal kasus kekerasan dalam berita Kompas dibingkai sebagai masalah hukum, bukan masalah yang lainnya. *Kedua*, kasus kekerasan FPI ini di tempatkan oleh Kompas di rubrik hukum. dengan menempatkan berita ini di rubrik hukum, secara tidak langsung sudah melihat dan memandang kasus kekerasan itu sebagai masalah hukum. *Ketiga*, sebagai konsekuensi dari melihat masalah ini sebagai masalah hukum, sumber berita yang diwawancarai adalah sumber berita yang berlatar belakang hukum. Atau, walaupun bukan orang yang berlatar belakang hukum (ahli hukum ataupun pengacara, tetapi berbicara dalam kerangka masalah hukum

**Tabel 06**  
**Frame Kompas**

<b>Judul</b>	<b>Isi berita/ wawancara</b>	<b>Sumber berita</b>
<b>Kebhinekaan Dicerai</b>	Aksi anarkisme yang dilakukan oleh massa beratribut Front Pembela Islam (FPI) dan organisasi masyarakat lain terhadap anggota Aliansi Kebangsaan untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan (AKKBB) pada peringatan hari kelahiran pancasila, dikawasan Monumen Nasional, Jakarta, telah mencederai kehidupan kebangsaan di indonesia yang menjunjung tinggi kebhinekaan. Oleh karena itu pelakunya harus di kenai sangsi hukum.	Abdurahman Wahid, Din Syamsudin, Andi malaranggeng (jubil kepresidnan) Irjen Abubakar Nataperwira, Gp Ansor, Malik Haramain (kativ Humas Polri)



<b>Polda Beri Ultimatum</b>	Kepala polda metro jakarta pusat, memberi ultimatum kepada para tersangka dari anggota Front Pembela Islam, untuk segera menyerahkan diri. Saya kaepala polda metro jaya memberikan waktu sampai dengan malam ini, kepada tersangka untuk segera menyerahkan diri. Saya akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku	Kepala Polda Metro Jaya, Adang Firman, Panglima Kodam Jaya (My J Suryo Prabowo) Nadrah Izzahri, Zannuba Arifah Chafsoh, KH Hasyim Muzaddi (Ketua PBNU
<b>Negara Tidak Boleh Kalah</b>	Presiden SBY meminta hukum untuk segera ditegakkan kepada para pelaku kekerasan,. Negara ini berlandaskan hukum. Jadi siapa saja yang melanggar hukum, maka akan di proses secara hukum.“Negara Tidak Boleh Kalah Dengan Aksi Kekerasan”, pemerintah akan mengambil langkah tegas kepada siapapun yang terlibat kekerasan dan harus bertanggung jawab atas perbuatanya	Presiden SBY, Widodo AS (mentri politik hukum), Din Syamsudin ( ketua pp muhammadiyah), Komjen Handarso Danuri, Agung Laksono (Ketua DPR), Munarman (Komando Laskar Islam),

**Diagnoses Causes:** dalam keseluruhan pemberitaan Kompas dari edisi, 2 Mei sampai dengan 6 Mei organisasi massa Front Pembela Islam dijadikan sebagai pelaku (aktor), sebagai penyebab masalah. Di sini letak permasalahanya ada pada FPI bukan yang lainnya. Misalnya anggota AKKBB atau pemerintah yang lamban dalam menanggapi kasus Ahmadiyah ataupun lemahnya penjagaan dari pihak kepolisian. Ini bisa dilihat dari bagaimana teks berita-berita tersebut meletakkan penilaian hukum lebih banyak kepada FPI. *Pertama*, pendapat Din Syamsudin yang melihat kasus hukum aksi kekerasan yang dilakukan oleh FPI ini sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-

nilai islam. Perbedaan pendapat dikalangan masyarakat seharusnya tidak harus diselesaikan main hakim sendiri “ JAKARTA – Juru Bicara Kepresidenan Andi Malaranggeng menegaskan, indonesia adalah negara hukum dan menjamin setiap warga negara untuk menjalankan hak asasinya.”<sup>3</sup>

Pada bagian yang lain, Kompas bahkan secara jelas menuliskan *lead* pernyataan dalam pemberitaanya yang secara tidak langsung menjelaskan bahwa penyebab dari masalah kekerasan yang terjadi di Monas dilakukan oleh Front Pembela Islam

“JAKARTA, KOMPAS – kekerasan yang dilakukan massa yang beratribut Front Pembela Islam dan beberapa organisasi masyarakat lainnya terhadap anggota Aliansi Kebangsaan Untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan pada peringatan hari kelahiran pancasila, Minggu (1/5) dikawasan Monumen Nasional, Jakarta, mencederai kehidupan kebangsaan di Indonesia yang menjunjung tinggi kebhinekaan.”<sup>4</sup>

Dari sini sudah mulai kelihatan, bagaimana FPI ditempatkan dalam keseluruhan berita terkait kekerasan yang terjadi di lapangan silang Monas sebagai penyebab masalah atau sumber masalah. Sebaliknya massa AKKBB secara tidak langsung dipandang sebagai korban dari aksi kekerasan FPI. Dalam Pemberitaan Kompas memang dikembangkan berita bahwa yang melakukan aksi kekerasan di Monas itu bukan dari organisasi massa FPI tetapi dari Laskar Pembela Islam (LPI) yang terdiri dari ormas-ormas islam yang ada di Indonesia. Sebagaimana kutipan yang disertakan dalam pemberitaan Kompas.

“Panglima Komando Laskar Islam Munarman mengoreksi pemberitaan media yang mengatakan bahwa penyerangan terhadap AKKBB, bukan dilakukan oleh FPI.”<sup>5</sup>

“Saya katakan bahwa yang kemarin mendatangi monas adalah Komando Laskar Islam yang merupakan gabungan dari laskar-laskar seluruh indonesia.”<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Kompas, *Kebhinekaan Dicederai*, 2 Mei 2007 hal. 15

<sup>4</sup> Kompas, *Kebhinekaan Dicederai*, 2 Mei 2007 hal. 1

<sup>5</sup> Kompas, *Negara Tidak Boleh Kalah*, 3 Mei 2007 hal. 15

<sup>6</sup> Kompas, *Negara Tidak Boleh Kalah*, 3 Mei 2007 hal. 15

Tetapi pernyataan yang disampaikan oleh Munarman tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, memang pada saat yang bersamaan juga banyak ormas-ormas islam yang melakukan aksi demonstrasi di sekitar monas tetapi yang melakukan aksi kekerasan terhadap AKKBB di lapangan silang Monas itu hampir keseluruhannya beratribut FPI. Dari fakta itu pihak kepolisian menjadikan FPI sebagai tersangka dalam kasus kekerasan ini.

“JAKARTA, KOMPAS – Kepala Polda Metropolitan Jakarta Raya Inspektur Jendral Adang Firman memberi ultimatum kepada para tersangka anggota Front Pembela Islam-setidaknya 10 orang-untuk menyerahkan diri secepatnya”<sup>7</sup>

***Make Moral Judgement:*** penilaian Kompas terhadap FPI sebagai sumber masalah ini datang dari fakta yang terjadi dilapangan. Aksi kekerasan ini banyak sekali mendapat tanggapan atau bahkan kecaman yang datang dari beberapa tokoh agama terkemuka dan juga dari tokoh politik. FPI dalam kasus ini dibingkai sebagai kelompok radikal yang menjalankan dakwahnya dengan cara-cara kekerasan dan juga di bingkai sebagai kelompok yang anarkis dalam memperjuangkan aspirasi-aspirasinya dan Kompas juga menyatakan aksi kekerasan yang dilakukan oleh FPI tersebut sebagai tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai pancasila.

“masruchah - kami diserang massa *FPI* yang membawa bambu dan botol, padahal sebagian besar dari kami terdiri dari perempuan dan anak-anak.”<sup>8</sup>

“Setidaknya 12 orang peserta AKKBB terluka akibat kekerasan yang dilakukan *FPI*. Di antara yang terluka terdapat Direktur Eksekutif Internasional centre for islam (ICIP) Syafi’i Anwar.”<sup>9</sup>

“Tindak Kekerasan yang dilakukan organisasi tertentu dan orang-orang tertentu mencoreng nama baik negara kita, di negeri sendiri maupun dunia. Jangan menciderai rakyat indonesia dengan tindakan-tindakan seperti itu.” Ujar Yudhoyono.(Kompas : Selasa, 3 Mei 2007. Negara Tidak Boleh Kalah)

---

<sup>7</sup> Kompas, *Polda Beri Ultimatum*, 4 Mei 2007, hal. 1

<sup>8</sup> Kompas, *Kebhinekaan Dicederai*, 2 Mei 2007, hal. 1

<sup>9</sup> Kompas, *Kebhinekaan Dicederai*, 2 Mei 2007, hal. 1

“kami diserang massa FPI yang membawa bambu dan botol, padahal sebagian besar dari kami terdiri dari perempuan dan anak-anak.”

Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh Front Pembela Islam itu sangat jauh dari ajaran agama islam yang sangat menganjurkan kedamaian dan tidak menganjurkan kekerasan dalam mencapai tujuan-tujuan dakwahnya. Tindakan FPI, dalam pandangan Kompas adalah sebagai perilaku yang menyimpang dari ajaran agama islam ataupun dari nilai-nilai luhur Pancasila.

**Treatmen Recommendation:** secara tidak langsung Kompas merekomendasikan kasus kekerasan yang dilakukan FPI ini untuk diusut tuntas oleh pihak kepolisian dan menangkap semua pelaku yang terlibat aksi kekerasan. Ini sebagai konsekuensi logis dari melihat kasus ini sebagai kasus hukum, bukan kasus politik ataupun moral. Dan sebagai masalah hukum yang dibidik sebagai tersangka adalah anggota FPI bukannya yang lain, sebagai balasan bagi korban-korban kekerasan yang terdiri bukan saja dari umat non muslim tetapi juga ada umat muslim yang ikut serta dalam acara peringatan hari kelahiran Pancasila tersebut.

“JAKARTA-KOMPAS – presiden susilo bambang yudhoyono mengecam aksi kekerasan dan pelaku kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban di negara yang berlandaskan hukum. karena itu presiden meminta hukum ditegakkan dengan memberikan sanksi secara tepat. Negara tidak boleh kalah dengan aksi kekerasan”.<sup>10</sup>

“Bukan hanya ucapan yang kami harapkan dari SBY, tapi *action* untuk menindak para pelaku kekerasan”

“JAKARTA, KOMPAS – Kepala Polda Metropolitan Jakarta Raya Inspektur Jendral Adang Firman memberi ultimatum kepada para tersangka anggota Front Pembela Islam-setidaknya 10 orang-untuk menyerahkan diri secepatnya”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Kompas, Negara Tidak Boleh Kalah*, 3 Mei 2007, hal. 1

<sup>11</sup> *Kompas, Polda Beri Ultimatum*, 4 Mei 2007, hal. 1

Tabel 07

## Frame: Kasus Kekerasan FPI Adalah Masalah Hukum

<i>Define Problem</i>	Maslah Hukum
<i>Diagnoses Causes</i>	Front Pembela Islam Adalah Aktor Penyebab Kekerasan, Sedangkan AKKBB Adalah Korban
<i>Make moral judgmet</i>	FPI Telah Menodai Kebhinnekaan Bangsa, Anarkisme
<i>Treatment recomendation</i>	Di Bawa Keranah Hukum,

## C. Pemberitaan Kekerasan Monas pada Koran

Republika Berita, 2 Mei 2007



*Republika* pada edisi, Senin 2 Mei 2007, menjadikan peristiwa kekerasan yang terjadi di Monas sebagai bahasan utama dan mengetengahkan judul "Bentrokan Akibat Pemerintahan Lamban". *Republika* dalam hal ini mengidentifikasi bahwa persoalan Ahmadiyah menjadi pemicu utama penyebab terjadinya insiden monas. Persoalan Ahmadiyah adalah persoalan yang

sudah lama terjadi, namun, pemerintah dalam menangani kasus ini dinilai lamban dan tidak memiliki ketegasan.

*Republika* mengkonstruksikan bahwa penyebab utama terjadinya insiden Monas akibat sikap ketidaktegasan dan ketidaktepatan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Ahmadiyah. Hal tersebut bisa dilihat dari judul yang di ambil. Di mana secara langsung *Republika* memberikan pernyataan bahwa pemerintahlah yang seharusnya bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut. Tidak hanya terlihat dari judulnya saja, selanjutnya kita dapat melihat pada bagian *lead* , yaitu berupa lead pernyataan sikap *Republika* terhadap peristiwa tersebut.

“JAKARTA – Bentrokan antara massa Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) dengan Front Pembela Islam ( FPI) dinilai merupakan buntut dari lambanya pemerintah menangani masalah Ahmadiyah.” (Republika 2 Mei 2007 )

*Lead* tersebut diperkuat dengan pernyataan dari narasumber yang kemudian oleh pihak *Republika* dijadikan kutipan untuk lebih memperkuat judul yang mereka ambil. Salah satu narasumber yang diwawancarai oleh *Republika* adalah Hamdan, Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), ia menyatakan bahwa pihaknya sudah mengingatkan pemerintah bahwa sikap pemerintah yang tidak tegas dan tidak tepat dalam menyelesaikan persoalan Ahmadiyah, akan menimbulkan bentrokan yang di kawatirkan tidak hanya terjadi di Jakarta saja tetapi bisa meluas ke daerah-daerah lain diluar jakarta.

“Hamdan menyatakan bahwa pihaknya sudah mewanti-wanti pemerintah bahwa ketidaktegasan dan ketidaktepatan dalam menyelesaikan masalah Ahmadiyah bisa mengakibatkan bentrokan yang terjadi kemarin tak hanya akan terjadi dijakarta, tapi juga akan menjalar ke daerah-daerah lain. “ini bisa makin panas”. Katanya.” (Republika 2 Mei 2007 )

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Kuasa Forum Umat Islam (FUI), Munarman. Ia menilai bentrokan terjadi karena langkah tegas pemerintah soal Ahmadiyah tidak kunjung diterapkan. Langkah pemerintah yang super hati-hati dinilainya membuat situasi masyarakat tak menentu.

Pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab atas insiden tersebut. *Republika* juga mengkonstruksikan melalui kutipan pernyataan munarman adanya pihak-pihak yang secara sengaja memprovokasi pihak lain dalam insiden monas dan adanya keterlibatan umat agama lain yang turut campur dalam menanggapi persoalan Ahmadiyah, pernyataan tersebut yaitu

“Potensi bentrok semakin terbaca, kata munarman, karena yang berdemonstrasi mendukung Ahmadiyah seperti kemarin terjadi di Monumen Nasional ( Monas ) – bukan hanya aktivis, tapi juga umat agama lain. Mereka, kata munarman, bahkan menuding FUI sebagai umat yang kafir. “Disitu marahnya umat.” Kata Munarman.” (Republika 2 Mei 2007 )

Pada alinea ke enam, *Republika* secara sepintas menggambarkan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Dengan mengambil kutipan dari salah satu anggota AKKBB yang menyatakan bahwa polisi bergerak lamban dalam peristiwa tersebut. Namun, pada alinea ke tujuh, *Republika* memuat keterangan dari Kepala Polres Jakarta Pusat, Komisaris Besar Heru Winarko yang membantah tuduhan salah seorang massa AKKBB tersebut. Ia memaparkan bahwa massa AKKBB telah menyalahi aturan. Pada awalnya mereka hanya melakukan demonstrasi di Bunderan Hotel Indonesia, namun mereka malah bergerak menuju monas.

“Bentrokan di Monas kemarin terjadi setelah makan mi massal bubar. Tak diketahui pasti apa pemicu bentrokan itu. Salah satu pendemo dari AKKBB, Yudhi, mengatakan sebanyak 12 orang massa AKKBB lainnya

berlari tunggang-langgang. “Polisi geraknya lamban,” Yudhi menyesalkan.” (Republika 2 Mei 2007 )

“Tapi Kepala Polres Jakarta Pusat, Komisaris Besar Heru Winarko, menyesalkan massa AKKBB. Pasalnya, mereka mulanya hanya berdemonstrasi di Bunderan Hotel Indonesia.“Ternyata, mereka menuju monas juga,”sesalnya.” (Republika 2 Mei 2007 )

Menanggapi peristiwa yang terjadi di Monas tersebut, *Republika* memberi solusi kepada pemerintah agar segera menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung. Hal tersebut dapat terlihat pada alinea ke tiga, yaitu berupa kutipan pernyataan Hamdan.

“Jika pemerintah sudah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung tentang penghentian kegiatan Ahmadiyah, Hamdan menilai bentrokan tak akan terjadi. Situasi menggantung menurutnya bisa dimanfaatkan untuk memprovokasi masyarakat. Jadi, “Sekarang, saatnya ambil keputusan,” tandas Hamdan.” (Republika 2 Mei 2007 )

**Berita, 3 Mei 2007**





*Republika* pada edisi Selasa, 3 Mei 2007 kembali menjadikan insiden Monas sebagai bahasan utama dengan mengetengahkan judul “Masyarakat Diimbau Tak Lakukan Provokasi”. *Republika* mengidentifikasi insiden Monas yang melibatkan antara FPI dan AKKBB sebagai bentuk dari tuntutan masyarakat kepada pemerintah dalam penyelesaian Ahmadiyah. *Republika* menilai Ahmadiyah telah melakukan tindakan penodaan dan penistaan agama yang memancing terjadinya bentrok antara kedua ormas tersebut. Masalah Ahmadiyah merupakan persoalan yang amat rumit, karena tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. *Republika* menjelaskan melalui kutipan pernyataan Jimly Ashiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi dan M. Sholeh Amin, Ketua Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum PBNU, bahwa keyakinan Ahmadiyah adanya nabi terakhir setelah Nabi Muhammad SAW merupakan bagian dari penodaan terhadap agama, apalagi Ahmadiyah mengklaim dirinya sebagai islam.

“Dia mencontohkan masalah Ahmadiyah yang disebutnya rumit karena tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, tapi tetap mengklaim sebagai umat islam.”<sup>12</sup>

“...Menurutnya, keyakinan Ahmadiyah bahwa ada nabi lagi sesudah nabi Muhammad SAW merupakan penodaan terhadap islam.”<sup>13</sup>

*Republika* kembali menjelaskan melalui pernyataan yang disampaikan oleh Jimly Ashidiqie, bahwa konflik agama yang terjadi saat ini akibat dari mengekspresi kebebasan yang menggebu-gebu paada setiap individu.

“Salah satu yang melatar belakangi konflik antarumat beragama karena terlalu menggebu-gebu mengekspresikan kebebasan...”<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>“Masyarakat Diimbau Tak Lakukan Provokasi”, *Republika*, 3 Mei 2007, h. 1, Alinea 7.

<sup>13</sup>“Masyarakat Diimbau Tak Lakukan Provokasi”, *Republika*, 3 Mei 2007, h. 1, Alinea 8.

<sup>14</sup>“Masyarakat Diimbau Tak Lakukan Provokasi”, *Republika*, 2 Mei 2007, h. 1, Alinea 3.

Perubahan sistem pemerintahan pada awalnya bersifat otoriter berdasarkan kekuasaan mantan presiden Soeharto, akhirnya tumbang pada tahun 1998. Dalam era sepuluh tahun terakhir sistem pemerintahan demokrasi pun kian berkembang di Indonesia. Sistem demokrasi tidak serta merta memberikan kedamaian pada masyarakat pada umumnya, kebebasan saat ini lebih cenderung kelewat batas dan bersifat provokatif. Sehingga butuh kearifan dalam mengungkap kebebasan berekspresi. Seperti apa yang *Republika* kutip dari pernyataan Jimly Ashididie :

“Perubahan demokrasi sepuluh tahun terakhir membutuhkan kearifan dalam mengungkap kebebasan berekspresi. “Jadi, kalau mengekspresikan kebebasan yang provokatif, itu juga mengundang reaksi yang tidak perlu, katanya”.<sup>15</sup>

*Republika* juga menyampaikan adanya kekhawatiran isu pembubaran Ahmadiyah menjadi pembubaran FPI. *Republika* menilai adanya pihak-pihak yang sengaja berusaha untuk mengadu domba antar umat Islam. Namun, isu pembubaran FPI dipertegas dengan pernyataan dari Jimly Asshiddiqie, bahwa penyelesaian konflik dan tuntutan pembubaran FPI harus diselesaikan melalui jalur hukum. Jimly menyatakan bahwa yang memiliki kewenangan membubarkan organisasi massa seperti FPI adalah pengadilan, bukan Mahkamah Konstitusi (MK), seperti pernyataan yang dikutip oleh *Republika* :

“...Kalau yang dibubarkan itu parpol, di MK. Kalau ormas, di pengadilan biasa.”

Isu pergeseran persoalan penistaan agama juga disampaikan oleh politikus Partai Golkar, Agun Gunandjar, yang berpendapat bahwa penghormatan terhadap

---

<sup>15</sup>“Masyarakat Diimbau Tak Lakukan Provokasi”, *Republika*, 2 Mei 2007, h. 1, Aline 5.

keragaman beragama berbeda dengan persoalan penistaan agama. Ia juga mengingatkan agar masalah tersebut jangan dikaburkan menjadi isu kebhinnekaan. *Republika* memberikan solusi, yaitu dengan meminta ormas AKKBB agar mawas diri dan menghentikan provokasi. Di lain pihak, *Republika* juga mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) Ahmadiyah. *Republika* dalam hal ini menghormati kebebasan bagi setiap umat untuk hidup dalam agama dalam kepercayaannya masing-masing, tetapi tidak diartikan kebebasan tersebut dengan melakukan tindakan penistaan terhadap agama lain.

**Berita,4 Mei 2007**



*Republika* edisi Rabu, 4 Mei 2007 masih menjadikan insiden Monas sebagai bahasan utama dengan mengangkat judul “Akar Masalahnya Ahmadiyah”. Pada edisi ini, secara tegas *Republika* mendefinisikan masalah terhadap persoalan Ahmadiyah. *Republika* menilai persoalan Ahmadiyah yang tak kunjung diselesaikan dan pada akhirnya memicu konflik antar umat beragama. Pernyataan Ketua DPR Agung Laksono, seperti dikutip oleh *Republika* bahwa kerusuhan yang terjadi di Monas harus diselesaikan secara hukum dan aparat diminta untuk bersikap adil. Di lain pihak ia juga menyatakan bahwa penyebab utama terjadinya kerusuhan tersebut adalah permasalahan Ahmadiyah yang harus diselesaikan secepatnya.

“Para pelaku kerusuhan Monas harus di hukum, tapi masyarakat jangan melupakan akar masalahnya, yakni Ahmadiyah yang hingga kini belum dibubarkan “ini penyebab utamanya menyangkut Ahmadiyah. Harus segera diselesaikan Ahmadiyahnya, sementara pelaku kriminal diproses secara hukum,” kata Agung. ( Republik 4 Mei 2007)

*Republika* melalui kutipan narasumbernya menilai bahwa penyebab tidak terselesaikan masalah Ahmadiyah, dikarenakan sikap ketidaktgasan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut terutama tak kunjung keluarnya SKB Ahmadiyah.

“Akar masalah insiden Monas, diakui ketua FPDIP, Tjahjo Kumolo, adalah ketidaktegasan pemerintah menyikapi keberadaan Ahmadiyah. Pembiaran Ahmadiyah memicu keresahan karena surat keputusan bersama (SKB) soal Ahmadiyah terus diulur-ulur.” ( Republik 4 Mei 2007)

“Sayangnya, komitmen pemerintah itu tak pernah muncul. Harusnya pemerintah tegas dan tidak ragu-ragu, katanya.” ( Republik 4 Mei 2007)

*Republika* memberikan solusi agar semua pihak bersikap tenang dan meredam emosi. Tidak terpancing oleh isu isu seperti tuntutan dari gerakan GP Ansor untuk membubarkan FPI secara paksa yang dapat membuat memanasnya situasi.

“Menyikapi memanasnya situasi, pemimpin pondok pesantren Al-Mizan, Jatiwaringin, Majalengka, Maman Imanulhaq Faqeh, meminta semua pihak meredam emosi. Menurut Maman yang menjadi salah satu korban kasus Monas, pesantren mengajarkan damai dan menghargai rasionalitas serta perbedaan.” ( Republik 4 Mei 2007)

**Berita, 5 Mei 2007**

# Umat Islam Diminta Bersatu

**Semua pimpinan ormas diharapkan menahan diri.**

**JAKARTA** — Umat Islam diminta waspada terkait situasi pas-cakeruwahan di Monas, Abad (1/8) lalu. Situasi saat ini dinilai sudah bergeser menjadi ajang siasa domba sesama penganut Islam.

Anggota Forum Pemuli Umat dan Bangsa (FPUB), Ferry Nur, berharap umat beres agar tidak mudah terprovokasi yang merugikan. “Siapa yang untung dari pertikaian antara Ansor dan Front Pembela Islam (FPI)? Ansor penganut Islam, FPI juga Islam. Mereka jangan mau diadu domba oleh pihak lain,” kata Ferry, Rabu (4/5).

Daripada saling serang, Sekjen Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISIPA) ini mengimbau umat bersatu dan menjaga ukhuwah. “FPUB menyeru umat merapatkan barisan.”

Koordinator FPUB, KH Fikri Barma, merasa heran perbedaan perlakuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus Monas. “Saya berharap setelah insiden Monas, Presiden lepidat dengan gagah, menyelesaikan kejadian itu. Tapi, mengapa Presiden tak bergi-

datu sebagai dituntutnya itu dalam hal pemerintahan Alhamdulillah.”

Ketua Umum PIRNU, KH Hasyim Mahdi, lega mengatakan tak boleh ada badan penerus ataupun lembaga-lembaga di bawah NU yang menuliskan pembubaran FPI. Pembubaran FPI merupakan domain negara. “Itu tidak dalam kapasitas aturan NU.” Katanya di Mekkah seperti dilaporkan wartawan *Republika*, **Damanhuri Zuhri**.

Hasyim juga tidak memampik bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat yang menyimpang dari Islam. “Yang penting itu caranya. Dia (Ahmadiyah) bisa masuk kelompok di kaum Muslimin. Terus harus dibubarkan dengan dakwah. Karena keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan kekerasan,” katanya.

Ketua Umum Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) Syahada Bahri, mengimbau para tokoh dan pemimpin masyarakat tidak mudah diadu domba. Ketua DPR, Agung Laksono, menambahkan, potensi konflik horizontal sesama umat pascainsiden sangat besar.

Karena itu, Agung meminta semua pimpinan ormas menahan diri dan meredam aksi. Dan yang terpenting, surat keputusan bersama (SKB) soal Ahmadiyah harus segera tertbit. “Masyarakat banyak yang ingin Ahmadiyah keluar karena pertimbangan hukum. Pemerintah harus menyelesaikan kasus Ahmadiyah ini.”

Wakilnya DPP PPP, Yusuf Taufiqulhadi, yakin jika pemerintah tidak beresnya tugas berhadapan Ahmadiyah, di belakang hari akan muncul anggota masyarakat lain yang mengancam FPI. Ketua Umum Dewan KH Indonesia Ansor, meminta pemerintah tugas berhadapan Ahmadiyah. “Tapi, kami juga memohon semua pihak bisa menahan diri,” katanya di Bandung.

Juru bicara Presiden, Andi Malarangeng, menjelaskan, SKB Ahmadiyah masih dalam proses. “Ini tak gampang karena menyangkut masalah umat.”

**Dewadagi tergar**

Juru bicara Dewadagi, Saif Situmorang, mengatakan, Dewadagi telah mengemukakan surat teguran ke FPI dan Ansor. Ketegasan untuk Ketegasan Beragama dan Berkeadilan (AKKBB) pada 3 Juni 2006. FPI dilugar karena pemertanggungjawabannya ketertarikan umat. AKKBB dilugar karena apa? ahah itu masalah pemertanggungjawabannya.

Ormas pengganggu ketertarikan umat, kata Saif, dapat dibekukan. “Sedangkan keberadaannya AKKBB belum berakhir.”

Kemarin, polisi menangkapan pimpinan FPI, Habib Rizieq Shihab, sebagai tersangka. Habib ditahan Pasal 331 KUHP karena tuduhannya atau menyebarkan berita palsu untuk pidana. Kata Kadiv Humas Mabes Polri, Iryen Alimbar Natasawira.

Pengacara FPI, Mahmuladatta, menyatakan, status tersangka itu belum sah. “Karena belum ada persertakaan (BAP) dalam sidang.”

Panglima Komando Laskar Islam, Mawarman, yang ditentang sebagai salah satu tersangka, menyatakan, menahan diri. “Saya belum datang ke Polda agar tidak berjudal lebih dulu dan merugikan.”



Ketua FPI, Habib Rizieq (bersebelah), dibawa ke Polda Metro Jaya, Rabu (4/5).

*Republika* pada edisi Kamis, 5 Mei 2007 masih menjadikan insiden Monas sebagai bahasan utama, yaitu dengan mengangkat judul “Umat Islam Diminta Bersatu”. *Republika* sebagaimana yang tertulis pada bagian *lead* menjelaskan bahwa situasi saat ini dinilai menjadi ajang adu domba sesama penganut islam.

“JAKARTA – Umat islam diminta waspada terkait pascakerusuhan di Monas, Ahad (1/5) lalu. Situasi saat ini dinilai sudah bergeser menjadi ajang adu domba sesama penganut agama islam.”

“Anggota Forum Peduli Umat dan Bangsa (FPUB), Ferry Nur, berharap umat cerdas agar tidak mudah tersulut provokasi yang merugikan...”

*Republika* kembali menegaskan bahwa persoalan Ahmadiyah yang belum juga diselesaikan. Beberapa pihak merasa kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak tegas dan terkesan adanya perbedaan perlakuan Presiden dalam kasus Monas dan Ahmadiyah.

“Kordinator (FPUB), KH Fikri Bareno, merasa heran perbedaan perlakuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus Monas. “Saya bangga setelah insiden Monas, Presiden berpidato dengan gagah, menyesalkan kejadian itu. Mengapa Presiden tak berpidato segagah dan setegas itu dalam hal pembubaran Ahmadiyah?”.”

*Republika* kembali menuliskan pernyataan KH. Hasyim Muzadi yang menyatakan bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat dan menyimpang dari ajaran agama islam, seperti yang ia nyatakan pada edisi Rabu, 4 Mei 2007.

“Sebenarnya masalah Ahmadiyah bukan soal kebebasan beragama dan berkeyakinan, tapi penodaan agama tertentu, dalam hal ini islam.”

Pada edisi Kamis, 5 Mei 2007 ini, *Republika* seakan mempertegas kembali pernyataan Hasyim Muzadi dengan menyatakan bahwa Amadiyah menyimpang.

“Hasyim juga tidak menampik bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat yang menyimpang dari Islam. “yang penting itu caranya. Dia (Ahmadiyah) *kan* Masih *Nongkrong* di kaum muslimin. Tentu harus dihadapi dengan dakwah. Karena keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan kekerasan,”katanya.”

Agar pergeseran isu menjadi ajang adu domba tidak semakin memanas, *Republika*, melalui beberapa pernyataan narasumbernya meminta agar umat bersatu, menjaga ukhuwah dan merapatkan barisan. Umat diminta untuk tidak mudah terprovokasi yang pada akhirnya akan merugikan banyak pihak.

“...siapa yang untung dari pertikaian antara Ansor dan Front Pembela Islam (FPI). Ansor pemenganut Islam, FPI juga Islam. Mereka jangan mau di adu domba oleh pihak lain, kata Fery, Rabu (4/5).”

“Dari pada saling sserang, Sekjen Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA) ini menghimbau umat bersatu dan menjaga ukhuwah.”FPUB menyeru umat merapatkan barisan”.

*Republika* juga meminta pemerintah untuk tegas dengan segera mengeluarkan SKB. Namun, menanggapi penerbitan SKB tersebut, juru bicara kepresidenan, Andi Mallarangeng, menjelaskan bahwa penerbitan SKB masih dalam proses dan merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan karena menyangkut masalah sensitif. “Juru bicara presiden, Andi Mallarangeng, menjelaskan, SKB Ahmadiyah masih dalam proses.” Ini menyangkut masalah sensitif”

*Republika* menjelaskan pada bagian akhir tulisan pada edisi hari ini, kutipan pernyataan juru bicara Depdagri, Saut Situmorang yang menegaskan bahwa Mendagri telah mengirimkan surat teguran ke FPI dan AKKBB. FPI di tegur karena penyerangannya mengganggu ketertiban umum, sedangkan AKKBB di tegur karena apel akbar yang dilakukannya memicu penyerangan. Tidak hanya itu ,

*Republika* dalam tulisanya seolah menolak penetapan tersangka kepada pimpinan FPI, Habib Rizieq Sihab oleh polisi. Hal tersebut bisa dilihat melalui kutipan pernyataan pengacara FPI, Mahendradatta yang menyatakan bahwa status tersangka itu belum sah dikarenakan berita acara pemeriksaan (BAP) belum selesai. *Republika* juga mengklarifikasi tuduhan yang di sampaikan oleh berbagai pihak yang menyatakan bahwa Munarman, Panglima Komando Laskar Islam, pergi melarikan diri. Seperti yang terlihat melalui penulisan kutipan pernyataan Munarman, bahwa, “Saya belum datang ke Polda agar hukum berjalan secara adil dan seimbang.”

**Berita, 6 Mei 2007**

**14 OKP: Jangan Ada Diskriminasi**

**Pemerintah seharusnya mencermati akar masalah.**

JAKARTA—Sebanyak 14 organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) yang bergabung dalam Forum Pemuda Mahasiswa Islam (FPMM) menyeru agar tidak terburuk-buruk atau terburuk-buruk (tidak ada diskriminasi) dalam menangani kasus ini. FPMM mengkritik pemerintah karena tidak adil dan tidak demokratis. Hal tersebut terlihat dalam proses penanganan masalah.

"Saya belum datang ke Polda agar hukum berjalan secara adil dan seimbang."



*Republika* pada edisi Jumat, 6 Mei 2007, menjadikan insiden Monas sebagai bahasan utama dengan mengangkat judul “14 OKP : Jangan Ada Diskriminasi”. Pada pemberitaannya *Republika* memuat pernyataan 14 organisasi Kemsyarakatan dan Pemuda (OKP) yang tergabung dalam Forum Pemuda Mahasiswa Islam (FPMI). Dalam pemberitaan ini, *Republika* mengidentifikasi permasalahan Ahmadiyah sebagaipemicu terjadinya insiden Monas. Dalam pemberitaannya, *Republika* memposisikan pemerintah

sebagai aktor yang harus bertanggung jawab atas terjadinya insiden tersebut. Pemerintah dinilai lamban dalam menanggapi persoalan Ahmadiyah, terutama dalam penerbitan surat keputusan bersama (SKB) tentang Ahmadiyah. Banyak pihak yang menilai bahwa pemerintah bertindak tegas terhadap permasalahan Ahmadiyah dan segera menerbitkan SKB, insiden monas tidak akan mungkin terjadi.

“FPMI menganggap ketidak tegasan pemerintah terhadap Ahmadiyah merupakanpemicu bentrokan. “Kalau pemerintah cepat mengambil keputusan soal Ahmadiyah, insiden tak akan terjadi,” imbuh Syahrul.”

*Republika* juga mempertanyakan tanggung jawab pemerintah terhadap persoalan Ahmadiyah. Seperti yang dikutip dari wawancara dengan KH Didin Hafidhuddin, sebagai berikut:

“kelambanan pemerintah membubarkan Ahmadiyah justru menjadi pangkal masalah. “Pemerintah berkali-kali janji ( Soal Ahmadiyah). Pemimpin yang memberi pernyataan dan tak mewujudkannya, bagaimana bisa dipercaya?””

Kutipan tersebut menggambarkan bahwa pemerintah saat ini tidak dapat dipercaya, karena berulang kali janji menyelesaikan persoalan Ahmadiyah, tetapi

tidak pernah diwujudkan secara nyata. *Republika* melalui pernyataan Amien Rais menyatakan bahwa pro-kontra Ahmadiyah seabgai pemicu insiden Monas merupakan rekayasa politik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengalihkan perhatian masyarakat.

“Di Yogyakarta, mantan ketua MPR, Amien Rais, meminta masyarakat menahan diri. Akar kerusuhan Monas, yaitu pro-kontra Ahmadiyah adalah rekayasa politik. “Rezim yang gagal mensejahterakan rakyat, menambah pengangguran dan kemiskinan, pasti akan mencari isu untuk mengalihkan perhatian rakyat”.”

Pemerintah lagi-lagi dituduh oleh *Republika* sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya insiden Monas. Terlepas dari beberapa pernyataan yang *Republika* kutip, dalam pemberitaan ini *Republika* meminta kepada pemerintah untuk mencermati akar permasalahan pemicu bentrokan dan pemerintah diminta untuk bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam penyelesaian insiden Monas.

**Tabel 08**

**Ringkasan Berita Republika**

JUDUL	ISI BERITA	SUMBER
Bentrokan Akibat Pemerintahan Lamban	Imbas negatif dari lambanya pemerintah menangani kasus perihal tuntutan pembubaran Ahmadiyah, menjadi pemicu bentrokan antara <i>FPI</i> dan AKKBB. Jika pemerintah cepat mengambil keputusan perihal SKB pembubaran ahmadiyah mungkin kekerasan antara organisasi masyarakat tersebut tidak akan terjadi, para pelaku kekerasan Monas harus di jukum, tetapi pemerintah juga jangan melupakan penyebab utamanya yaitu Ahmadiyah	Ketua DPR Agung Laksono, Tjahjo kumolo (Ketua FDPIP), KH. Hasyim Mussadi ( Ketua PBNU), Maman Imanul Haq (Ketua Ponpes Al Mizan, Kombes Heru Winarko, Munarman

Masyarakat Diimbau Tak lakukan Provokasi	Bentrokan yang melibatkan AKKBB dan <i>FPI</i> di Monas diharapkan tidak meluas ke daerah-daerah lain dan tidak mengundang reaksi yang tidak perlu, salah satu penyebab yang melatar belakangi konflik antar umat beragama karena terlalu menggebu-gebu dalam mengekspresikan kebebasan. Beberapa tokoh politik dan hukum, menekankan agar seluruh komponen masyarakat tenang menanggapi peristiwa ini, khawatir jika peristiwa terus berkembang, akan terjadi adu domba dalam tubuh umat beragama, padahal persoalan agama bisa diselesaikan dengan dialog	Jimly Assidique (Ketua Mahkamah konstitusi), M. Soleh Amin (Rois syuriah), Agun Gunandjar, Widodo AS, Malik Harmain, Arbi Sanit, Mahendratta (pengacara Muslim)
Akar Masalahnya Ahmadiyah	Para pelaku kerusuhan Monas memang harus di proses hukum namun pemerintah jangan melupakan pangkal masalah bentrokan antara <i>FPI</i> dan AKKBB. "Akar masalah insiden Monas, diakui ketua FPDIP, Tjahjo Kumolo, adalah ketidaktegasan pemerintah menyikapi keberadaan Ahmadiyah. Pembiaran Ahmadiyah memicu keresahan karena surat keputusan bersama (SKB) soal Ahmadiyah terus diulur-ulur. Menyikapi memanasnya situasi, pemimpin pondok pesantren Al-Mizan, Jatiwaringin, Majalengka, Maman Imanulhaq Faqeh, meminta semua pihak meredam emosi. Menurut Maman yang menjadi salah satu korban kasus Monas, pesantren mengajarkan damai dan menghargai rasionalitas serta perbedaan	Agung Laksono, Tjahjo Kumolo, Ali Suparto, Maman Imanul Haq Faqieh, Soeripto (Anggota PKS), Habib Riziek Syihab.
Umat Islam Diminta Untuk Bersatu	Semua pimpinan ormas diminta untuk menahan diri dalam menanggapi konflik, <i>Republika</i> kembali menegaskan bahwa persoalan Ahmadiyah yang belum juga diselesaikan. Beberapa pihak	Sekjen Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA), KH Hasyim Musaddi, Fikri Bareno, Syuhada Bahri (Ketua Umum Dewan Dakwah

	<p>merasa kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak tegas dan terkesan adanya perbedaan perlakuan Presiden dalam kasus Monas dan Ahmadiyah. “Kordinator (FPUB), KH Fikri Bareno, merasa heran perbedaan perlakuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus Monas. “Saya bangga setelah insiden Monas, Presiden berpidato dengan gagah, menyesalkan kejadian itu. Mengapa Presiden tak berpidato segagah dan setegas itu dalam hal pembubaran Ahmadiyah?””</p>	<p>Islamiyah, teungku taufiqu hadi (DPP PPP), KH siddiq Amien (Ketua Umum Persis), Munarman, Mahendrata</p>
<p>14 OKP: Jangan Ada Diskriminasi</p>	<p>FPMI menganggap ketidak tegasan pemerintah terhadap Ahmadiyah merupakan pemicu bentrokan. “Kalau pemerintah cepat mengambil keputusan soal Ahmadiyah, insiden tak akan terjadi, imbuh Syahrul. Pemerintah dihimbau banyak pihak untuk berbuat adil, jangan ada intervensi terhadap siapapun karna semua warga indonesia, Di Yogyakarta, mantan ketua MPR, Amien Rais, meminta masyarakat menahan diri. Akar kerusuhan Monas, yaitu pro-kontra Ahmadiyah adalah rekayasa politik. “Rezim yang gagal mensejahterakan rakyat, menambah pengangguran dan kemiskinan, pasti akan mencari isu untuk mengalihkan perhatian rakyat</p>	<p>Amien Rais, KH Didin Hafidhuddin, Ari Yusuf Amir, irjen Abubakar Nataperwira, Surya Darma ali, Ahmad Suhargono, AKP Lutfi F.</p>

### C. Frame Republika

Republika menurunkan pemberitaan mengenai aksi kekerasan yang dilakukan oleh Front Pembela Islam sebagai pemberitaan utamanya dari awal yaitu pada tanggal 2 – Mei 2007 dengan mengangkat judul-judul yang sama sekali berbanding terbalik

dengan judul-judul yang di angkat oleh Kompas. Mungkin saja perbedaan pemberitaan yang dilakukan Republika menyangkut kepada pendefinisian isu terkait kekerasan yang dilakukan FPI atau bahkan faktor idiologi *Republika* yang memang berlatar belakang dari media yang memiliki besik islam.

Pemberitaan yang diterbitkan Republika terkait aksi kekerasan yang dilakukan *Front Pembela Islam* terhadap *Aliansi Kebangsaan Untuk Kebebasan Umat Beragama dan Berkeyakinan* 1 Mei 2007. Banyak menyertakan kutipan-kutipan wawancara dari beberapa tokoh politik dan juga tokoh agama di seluruh Indonesia. Kita akan melihat bagaimana kasus kekerasan ini dibingkai oleh Republika

***Define problem:*** frame yang dikembangkan Republika terkait kasus kekerasan yang dilakukan oleh massa FPI adalah masalah Moral. Berbanding terbalik dengan Kompas yang mendemfinisikan masalah kekerasan FPI ini sebagai masalah hukum, tetapi Republika lebih melihat aksi kekerasan yang dilakukan FPI sebagai aksi yang menuntut penegakan hukum terhadap Ahmadiyah, yang menjadi akar dari penyebab terjadinya kekerasan tersebut.

*Frame* yang dikembangkan oleh *Republika* mengenai peristiwa bentrokan antara FPI dan AKKBB adalah masalah penegakan Moral. Republika lebih melihat terhadap sumber masalahnya yang melatar belakanginya bentrokan tersebut, pemerintah di anggap ragu-ragu dan hati hati dalam mengambil keputusan hukum terkait persoalan Ahmadiyah. Pemerintah seperti membiarkan persoalan ini berlarut larut hingga sampailah pada puncak kekesalan umat islam khususnya FPI terhadap Ahmadiyah yang sudah jelas secara langsung menodai akidah umat islam, umat islam punya landasan-landasan yang sudah terurai jelas dalam Al-QURAN tentang cara-cara menghormati umat yang

berlainan agama. Lain halnya dengan ahmadiyah yang mengaku islam tapi tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir.

Tetapi *Republika* menganggap pemerintah seperti tidak sadar bahwa ahmadiyah sudah menjadi peluru untuk menggoyahkan akidah umat islam, pasalnya mereka mengaku islam tetapi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, bahkan mereka menyatakan bahwa ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Andai kata Ahmadiyah tidak menggunakan nama Islam, pastilah toleransi akan tetap terjaga. Hal tersebut yang menjadikan *Republika* Mengidentifikasi masalah insiden Gambir ini sebagai masalah moral, karena *Republika* memandang apa yang dilakukan FPI adalah sebuah aksi tuntutan terhadap pembubaran Ahmadiyah ini sudah lama di suarakan dari berbagai kalangan Umat islam.

Kasus kekerasan yang dilakukan FPI ini dikemas dan digiring oleh *Republika* dalam bingkai moral semacam itu. Ini bisa dilihat dari bagaimana berita ditulis, dan judul-judul yang diangkat oleh *Republika*

“JAKARTA – Bentrokan antara massa Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) dengan Front Pembela Islam ( FPI) dinilai merupakan buntut dari lambanya pemerintah menangani masalah Ahmadiyah.”<sup>16</sup>

“Jika pemerintah sudah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung tentang penghentian kegiatan Ahmadiyah, Hamdan menilai bentrokan tak akan terjadi. Situasi menggantung menurutnya bisa dimanfaatkan untuk memprovokasi masyarakat. Jadi, “Sekarang, saatnya ambil keputusan,” tandas Hamdan.”<sup>17</sup>

“Salah satu yang melatar belakangi konflik antarumat beragama karena terlalu menggebu-gebu mengekspresikan kebebasan...”<sup>18</sup>

“Para pelaku kerusuhan Monas harus di hukum, tapi masyarakat jangan melupakan akar masalahnya, yakni Ahmadiyah yang hingga kini belum dibubarkan “ini penyebab utamanya menyangkut Ahmadiyah. Harus segera diselesaikan Ahmadiyahnya, sementara pelaku kriminal diproses secara hukum,” kata Agung.

<sup>16</sup> *Republika, Bentrokan Akibat Pemerintahan Lamban, 2 Mei 2007, hal 1*

<sup>17</sup> *Republika, Bentrokan Akibat Pemerintahan Lamban, 2 Mei 2007, h. 1*

<sup>18</sup> *Republika, Masyarakat Dihimbau Tidak melakukan Provokasi, 3 Mei 2007, hal. 1*

**Tabel 09**  
**Frame Republika**

Judul	Isi berita/ wawancara	Sumber berita
<p><b>Bentrokan Akibat Pemerintahan Lamban</b></p>	<p>Imbas negatif dari lambanya pemerintah menangani kasus perihal tuntutan pembubaran Ahmadiyah, menjadi pemicu bentrokan antara <i>FPI</i> dan AKKBB. Jika pemerintah cepat mengambil keputusan perihal SKB pembubaran ahmadiyah mungkin kekerasan antara organisasi masyarakat tersebut tidak akan terjadi, para pelaku kekerasan Monas harus di jukum, tetapi pemerintah juga jangan melupakan penyebab utamanya yaitu Ahmadiyah</p>	<p>Ketua DPR Agung Laksono, Tjahjo kumolo (Ketua FDPIP), KH. Hasyim Mussadi (Ketua PBNU), Maman Imanul Haq (Ketua Ponpes Al Mizan, Kombes Heru Winarko, Munarman</p>
<p><b>Akar Masalahnya Ahmadiyah</b></p>	<p>Para pelaku kerusuhan Monas memang harus di proses hukum namun pemerintah jangan melupakan pangkal masalah bentrokan antara <i>FPI</i> dan AKKBB. “Akar masalah insiden Monas, diakui ketua FPDIP, Tjahjo Kumolo, adalah ketidaktegasan pemerintah menyikapi keberadaan Ahmadiyah. Pembiaran Ahmadiyah memicu keresahan karena surat keputusan bersama (SKB) soal Ahmadiyah terus diulur-ulur. Menyikapi memanasnya situasi, pemimpin pondok pesantren Al-Mizan, Jatiwaringin, Majalengka, Maman Imanulhaq Faqeh, meminta semua pihak meredam emosi. Menurut Maman yang menjadi salah satu korban kasus Monas,</p>	<p>Agung Laksono, Tjahjo Kumolo, Ali Suparto, Maman Imanul Haq Faqieh, Soeripto (Anggota PKS), Habib Riziek Syihab</p>

	pesantren mengajarkan damai dan menghargai rasionalitas serta perbedaan	
<b>Umat Islam Diminta Untuk Bersatu</b>	Semua pimpinan ormas diminta untuk menahan diri dalam menanggapi konflik, <i>Republika</i> kembali menegaskan bahwa persoalan Ahmadiyah yang belum juga diselesaikan. Beberapa pihak merasa kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak tegas dan terkesan adanya perbedaan perlakuan Presiden dalam kasus Monas dan Ahmadiyah. “Kordinator (FPUB), KH Fikri Bareno, merasa heran perbedaan perlakuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus Monas. “Saya bangga setelah insiden Monas, Presiden berpidato dengan gagah, menyesalkan kejadian itu. Mengapa Presiden tak berpidato segagah dan setegas itu dalam hal pembubaran Ahmadiyah?”.”	Sekjen Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA), KH Hasyim Musaddi, Fikri Bareno, Syuhada Bahri (Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah, teungku taufiqu hadi (DPP PPP), KH siddiq Amien (Ketua Umum Persis), Munarman, Mahendrata

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa bingkai yang diberikan *Republika* terkait aksi kekerasan FPI adalah bingkai moral. Yaitu lambanya pemerintah dalam menangani kasus Ahmadiyah. *Republika* memiliki pendefinisian tersendiri terkait kasus ini, kekerasan yang dilakukan FPI di pandang oleh *Republika* sebagai aksi tuntutan atas lambanya kinerja pemerintah dalam mengatasi masalah Ahmadiyah. Bingkai moral yang di berikan *Republika* terhadap kasus ini juga bisa dilihat dari judul pemberitaanya yang pertama. Yaitu pada tanggal 2 Mei 2007, *Republika* mengangkat judul “Bentrokan Akibat Pemerintahan Lamban”, judul ini sangat jelas terlihat bahwa sedikitpun *Republika* tidak



melihat kasus ini sebagai mana yang di definisikan Kompas. *Republika* lebih melihat akar dari masalahnya yang menyebabkan FPI melakukan kekerasan di Gambir.

“Rezim yang gagal mensejahterakan rakyat, menambah pengangguran dan kemiskinan, pasti akan mencari isu untuk mengalihkan perhatian masyarakat,” Kata Amin Rais Mantan Ketua MPR.<sup>19</sup>

Menanggapi kecaman kedubes AS tentang insiden Monas, juru bicara Deplu, Teuku Faizasyah, mengatakan, kejadian itu merupakan masalah dalam negeri. “Mungkin ada baiknya mereka (AS) tak komentar sebelum terkumpul fakta-fakta yang jelas.”<sup>20</sup>

**Diagnoses Causes:** Tidak ada asap jika tidak ada api. Ungkapan ini rasanya tepat untuk mengilustrasikan bingkai yang dilakukan oleh *Republika* ketika melihat sumber masalah terkait kekerasan yang dilakukan FPI terhadap AKKBB. *Republika* melihat bahwa kekerasan yang dilakukan FPI bukan tanpa sebab, tidak seperti Kompas yang secara jelas menyatakan FPI sebagai sumber masalah dalam peristiwa kekerasan itu. Berbanding terbalik dengan *Republika* yang lebih melihat akar masalah dari peristiwa kekerasan tersebut.

Dalam keseluruhan berita *Republika*, AKKBB dianggap sebagai kelompok yang di dalamnya juga terdapat jamaah Ahmadiyah diposisikan sebagai penyebab masalah. Sebaliknya, aksi kekerasan yang dilakukan oleh FPI dipandang sebagai aksi tuntutan terhadap pemerintah yang lamban dalam menyelesaikan persoalan Ahmadiyah. Misalnya dari judul yang diangkat oleh *Republika* pada edisi 2 Mei 2007 “Akar Masalahnya Ahmadiyah”. Bahkan, *Republika* dalam keseluruhan beritanya tidak menganggap persoalan ini sebagai aksi Radikalisme atau pencideraan terhadap kebhinekaan seperti halnya Kompas. *Republika* lebih melihat kasus ini kepada akar masalahnya yaitu Ahmadiyah.

---

<sup>19</sup> *Republika*, OKP: Jangan Ada Diskriminasi, 6 Mei 2007 hal. 1

<sup>20</sup> *Republika*, Ustd Jefry: SBY Harus Adil, 7 Mei 2007, hal 1

“Hamdan menyatakan bahwa pihaknya sudah mewanti-wanti pemerintah bahwa ketidaktegasan dan ketidaktepatan dalam menyelesaikan masalah Ahmadiyah bisa mengakibatkan bentrokan yang terjadi kemarin tak hanya akan terjadi di Jakarta, tapi juga akan menjalar ke daerah-daerah lain. “ini bisa makin panas”. Katanya.”

“Salah satu yang melatar belakangi konflik antarumat beragama karena terlalu menggebu-gebu mengekspresikan kebebasan”<sup>21</sup>

“Papernas harus mawas diri menghentikan provokasi, dan kemudian jajaran NU, Muhammadiyah, sampai kedaerah. begitu juga dengan FPI tidak usah terprovokasi ini bahaya benar”<sup>22</sup>

“Potensi bentrok semakin terbaca, kata Munarman, karena yang berdemonstrasi mendukung Ahmadiyah seperti kemarin terjadi di Monumen Nasional ( Monas ) – bukan hanya aktivis, tapi juga umat agama lain. Mereka, kata Munarman, bahkan menuding FUI sebagai umat yang kafir. “Disitu marahnya umat.” Kata Munarman.”<sup>23</sup>

“Umat agama lain diminta tidak ikut campur dalam masalah komunis”<sup>24</sup>

Melihat kutipan-kutipan yang disertakan dalam pemberitaannya penulis menyimpulkan bahwa, *Republika* sangat pro terhadap FPI dan kontra terhadap Papernas. Dari banyaknya judul-judul yang diangkat *Republika* dan kutipan-kutipan yang disertakan dalam pemberitaannya selalu menganggap bahwa Papernas yang di dalamnya terdapat ajaran komunis dipandang sebagai sumber masalah dari peristiwa kekerasan tersebut. Di dalam berita tersebut juga banyak disebutkan bahwa kekerasan yang dilakukan FPI awalnya terdapat provokasi yang dilakukan oleh Pihak Papernas.

***Make Moral Judgement:*** ketika masalah sudah di definisikan, penyebab masalah sudah ditentukan dibutuhkan sebuah argumentasi kuat untuk mendukung gagasan tersebut. *Frame* Ahmadiyah sebagai aktor penyebab terjadinya kekerasan ini di dukung klaim klaim moral, terutama dari pihak yang pro terhadap FPI. Kekerasan yang

<sup>21</sup> *Republika, Masyarakat Diimbau tak Lakukan Provokasi*, hal. 1

<sup>22</sup> *Republika, Masyarakat Diimbau tak Lakukan Provokasi*, hal. 1

<sup>23</sup> *Republika, Bentrokan Akibat Pemerintahan Lamban*, 2 Mei 2007, h. 1

<sup>24</sup> *Republika, Akar Masalahnya Ahmadiyah*, 4 Mei 2007, hal. 1

dialakukan FPI dipandang *Republika* sebagai aksi tuntutan terhadap lambanya pemerintah dalam menyelesaikan kasus Ahmadiyah. Kekerasan yang dilakukan FPI itu bukan tanpa sebab, andai saja pemerintah lebih tegas dalam menyikapi kasus Ahmadiyah maka kasus kekerasan itu tidak akan terjadi. Ahmadiyah dianggap sebagai kelompok yang telah menodai agama islam, karna mereka mengaku islam tetapi tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Seperti kutipan yang di tuliskan *Republika* dalam pemberitaanya “kami menyesalkan tindakan kekerasan yang dilakukan FPI, tapi hal itu juga terjadi bukan tanpa sebab. Kerena itu pemerintah harus secepatnya mengeluarkan suarat SKB Ahmadiyah”. Kutipan ini menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh FPI bukan tanpa alasan tapi kekerasan aksi tuntutan kepada lambanya kinerja pemerintah. Kekerasan yang dilakukan FPI sebgai perjuangan dari kelompok muslim yang menginginkan penegakan amal ma’ruf nahi mungkar bukan untuk menciderai kebhinekaan dan keragaman umat beragama di Indonesia.

Tindakan FPI dalam pandangan *Republika* tidak dianggap sebagai tindakan yang buruk karena dalam pemberitaanya juga di labeli dengan moral yang tinggi yang ingin mengungkap kebenaran bahwa FPI sangat memperjuangkan pembubaran Ahmadiyah. Dari judul yang diangkat *Republika* dalam pemberitaanya, yaitu “Umat Dihimbau Tak Lakukan Provokasi”, “Umat Islam Diminta Bersatu”. Judul-judul ini secara tegas ingin menegaskan bagaimana FPI tidak punya motiv ingin melakukan kekerasan, kekerasan itu terjadi karna provokasi yang dilakukan oleh AKKBB. Kekerasan itu sebagai upaya dari motivasi yang luhur untuk mengungkapkan kebenaran. Tindakan FPI dalam pandangan *Republika* tidak dianggap buruk karna dilabeli dengan moral yang tinggi ingin mengungkap kebenaran.

“Akar masalah insiden Gambir, diakui ketua FPDIP, Tjahjo Kumolo, aadalah ketidaktegasan pemerintah menyikapi keberadaan komunisme. Pembiaran

Ahmadiyah memicu keresahan karena surat keputusan bersama (SKB) soal Muhammadiyah terus diulur-ulur”<sup>25</sup>

“Menyikapi memanasnya situasi, pemimpin pondok pesantren Al-Mizan, Jatiwaringin, Majalengka, Maman Imanulhaq Faqeh, meminta semua pihak meredam emosi. Menurut Maman yang menjadi salah satu korban kasus Monas, pesantren mengajarkan damai dan menghargai rasionalitas serta perbedaan.”<sup>26</sup>

“FPMI menganggap ketidak tegasan pemerintah terhadap Muhammadiyah merupakan pemicu bentrokan. “Kalau pemerintah cepat mengambil keputusan soal Muhammadiyah, insiden tak akan terjadi,” imbuh Syahrul.”<sup>27</sup>

Potensi bentrok semakin terbuka, kata Munarman, karena yang berdrmonstrasi mendukung Muhammadiyah-seperti yang kemarin terjadi di Monas-bukan hanya aktivis, tapi juga umat agama lain. Mereka, kata Munarman, bahkan menuding FUI sebagai umat yang kafir. “Disitu marahnya umat”.<sup>28</sup>

***Treatmen Recomendation:*** Secara tidak langsung merekomendasikan agar pemerintah cepat-cepat membubarkan Muhammadiyah. Sebagai obat dari kekesalan yang sudah lama dipendam oleh sekelompok umat muslim terhadap perilaku menyimpang Muhammadiyah. Di samping itu juga Republika merekomendasikan sikap kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi, peristiwa kekerasan itu jangan dijadikan alasan sebagai perpecahan umat islam.

“Hamdan menyatakan bahwa pihaknya sudah mewanti-wanti pemerintah bahwa ketidaktegasan dan ketidaktepatan dalam menyelesaikan masalah Muhammadiyah bisa mengakibatkan bentrokan yang terjadi kemarin tak hanya akan terjadi di Jakarta, tapi juga akan menjalar ke daerah-daerah lain. “ini bisa makin panas”. Katanya.”

“JAKARTA – Umat islam diminta waspada terkait pascakerusuhan di Monas, Ahad (1/5) lalu. Situasi saat ini dinilai sudah bergeser menjadi ajang adu domba sesama penganut agama islam”<sup>29</sup>

“Anggota Forum Peduli Umat dan Bangsa (FPUB), Ferry Nur, berharap umat cerdas agar tidak mudah tersulut provokasi yang merugikan”<sup>30</sup>

<sup>25</sup> Republika, Akar Masalahnya Muhammadiyah, 4 Mei 2007, hal. 1

<sup>26</sup> Republika, Akar Masalahnya Muhammadiyah, 4 Mei 2007, hal. 1

<sup>27</sup> Republika, OKP: Jangan Ada Diskriminatif, 6 Mei 2007, hal. 1

<sup>28</sup> Republika, Bentrokan Akibat Pemerintahan Lamban, 2 Mei 2007, hal. 1

<sup>29</sup> Republika, Umat Diminta Bersatu, 5 Mei 2007, h. 1

<sup>30</sup> Republika, Umat Diminta Bersatu, 5 Mei 2007, h. 1

“Menyikapi memanasnya situasi, pemimpin pondok pesantren Al-Mizan, Jatiwaringin, Majalengka, Maman Imanulhaq Faqeh, meminta semua pihak meredam emosi. Menurut Maman yang menjadi salah satu korban kasus Monas, pesantren mengajarkan damai dan menghargai rasionalitas serta perbedaan”<sup>31</sup>

“Kami akan meredam massa di bawah, kata Maman. Kekerasan, tegasnya harus dihentikan kepada siapapun dan atas nama siapa saja”

Dari kutipan-kutipan diatas penulis melihat rekomendasi yang diberikan Republika terhadap aksi kekerasan FPI cukup banyak sekali. Namun bukan hanya menindak pelaku kekerasan tapi juga menindak akar masalah yang berbuntut aksi kekerasan tersebut. Republika memberikan perbedaan dalam memberikan rekomendasi terhadap kasus ini, mungkin ini disebabkan dari cara pandang Republika yang melihat kasus ini sebagai masalah moralitas bukan sebagai masalah hukum saja.

**Tabel 10**

**Frame: Kasus Kekerasan FPI Adalah Masalah Moral**

<i>Define Problem</i>	Masalah Moral
<i>Diagnoses Causes</i>	Komunisme
<i>Make Moral Judgetmen</i>	Lambannya kinerja pemerintah, FPI membawa misi suci untuk melawan komunisme
<i>Treatmen Recomendation</i>	Melawan ideologi komunisme

**D. Perbandingan Frame Kompas dan Republika**

Pembahasan di atas menunjukkan bagaimana peristiwa yang sama bisa dimaknai dan di definisikan secara berbeda. Pendefinisian yang berbeda tersebut menyebabkan peristiwa bisa berubah total. Peristiwanya sama, tetapi konstruksinya berbeda. Pola

<sup>31</sup>Republika, Akar Masalahnya Ahmadiyah, 4 Mei 2007, hal. 1

konstruksi tersebut menyebabkan perbedaan dalam hal bagaimana peristiwa dipahami oleh media. Kalau ini kita terapkan untuk menilai berita-berita di Kompas dan Republika maka akan tampak bingkai itu akan menimbulkan kecendrungan pemberitaan yang berbeda.

Dalam teori *framing* yang dikemukakan oleh Entman di sebutkan bahwa proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapat alokasi lebih besar dari pada alokasi yang lain. Hal ini juga dilakukan oleh kedua media tersebut dimana terjadi penonjolan aspek tertentu, pemilihan dan pendefinisian berita yang dikonstruksikan oleh kedua media tersebut. Sehingga menghasilkan berita yang berbeda. Kompas mendefinisikan kasus ini sebagai masalah hukum. persoalan dilihat sebagai siapa dan siapa yang benar dan aturan-aturan hukumnya. Ditandai dengan judul-judul yang diangkat oleh Kompas dan juga kutipan-kutipan narasumber yang disertakan dalam pemberitaannya, yang hampir keseluruhannya membicarakan tentang penegakan hukum yang harus dilakukan oleh aparat yang berwenang terhadap pelaku kekerasan.

*Kompas* juga memandang FPI sebagai sumber masalah. Kekerasan yang dilakukan massa FPI tepat pada hari kelahiran pancasila ini membuat masyarakat resah dan juga menciderai kebhinekaan bangsa. Pada akhirnya peristiwa ini direcomendasikan penyelesaiannya oleh Kompas yaitu dengan menindak tegas para pelaku kekerasan dengan hukuman yang sudah diatur di dalam konstitusi.

Bukan hanya itu saja dalam pemberitaannya pada tanggal 2 Mei 2007 di halaman paling depan Kompas menuliskan tulisan yang berjudul “Idiologi Harga Mati Bukan Harta Mati” ini menunjukkan bahwa Kompas dalam memandang kasus kekerasan yang

dilakukan FPI sebagai kekerasan yang kompleks karna dilakukan pada peringatan hari lahirnya pancasila yang dianggap sebagai idiologi bangsa Indonesia. disini mulai kelihatan bahwa Kompas dalam memberitakan kasus ini juga menegdepankan idiologinya. Sebagai media yang terkenal dengan sifat humanismenya dan memiliki latar belakang pendirinya yang beragama katholik. Terlihat jelas bahwa Kompas tidak subjektif dalam memberitakan suatu peristiwa.

Kasus ini dipandang oleh kompas hanya dari segi atau aspek tertentu tanpa melihat aspek yang lain, narasumber-narasumber yang diwawancarai lebih banyak dari pihak-pihak yang kontra terhadap aksi yang dilakukan oleh FPI. Penulis memang melihat disertakannya kutipan-kutipan dari pihak FPI tapi, tidak sebanyak dari pihak yang kontra terhadap FPI, ketidak berimbangan dalam hal wawancarapun bagian dari proses frame yang dilakukan oleh Kompas terhadap kasus ini.

Sebaliknya *Republika* melihat kasus ini lebih kepada akar permasalahan kenapa aksi tersebut bisa terjadi yaitu persoalan pembubaran Ahmadiyah. Ahmadiyah yang dianggap FPI sebagai kelompok yang menodai ajaran agama islam. Aksi tuntutan pembubaran ahmadiyah ini sudah lama di suarkan oleh sekelompok ormas-ormas islam tetapi respon yang di berikan pemerintah terkait tuntutan tersebut tidak kunjung dikeluarkan. Akhirnya kekesalan itu pun mulai memuncak di sebagian kelompok umat islam yang pada tanggal 1 Mei 2007 melakukan demonstrasi di Monas menuntut aksi pembubaran Ahmadiyah. Tidak di duga bahwa pada hari itupun terdapan ormas AKKBB yang sedang mengikuti perayaan hari lahirnya pancasila. Bentrokanpun akhirnya terjadi tatkala massa yang beratribut Fron Pembela Islam mengetahui bahwa AKKBB mendukung jamaah Ahmadiyah.

Republika mendefinisikan peristiwa ini sebagai masalah moral, kelambanan pemerintah dalam membubarkan Ahmadiyah menjadi sebab kekerasan yang dilakukan FPI. Republika menjadikan ideologi Sebagai Sumber masalah karna di anggap sebagai provokator bentrokan di Monas. FPI dalam pemberitaan *Republika* tidak sama sekali di anggap sebagai pelaku kekerasan, aksi kekerasan itu di pandang *Republika* sebagai aksi tuntutan terhadap lambanya pemerintah dalam menegakan hukum perihal kasus ahmadiyah. Ini mengindikasikan bahwa idiologi juga di kedepankan dalam pemberitaan Republika, sebagai media yang berlatar belakang pendirinya muslim dan juga mengedepankan nilai-nilai islam di dalam visi-misinya wajar apabila Republika memberikan *Frame* yang berbeda dengan Kompas.

Bukan hanya itu penulis juga melihat kesamaan dalam menyertakan kutipan-kutipan yang di sertakan dalam pemberitaanya. Republika dalam keseluruhan beritanya banyak sekali mengutip dari pihak-pihak yang pro terhadap FPI, ketidak berimbangan tersebut mengindikasikan bahwa Republika juga memiliki Frame dalam pemberitaanya terkait kasus kekerasan di Gambir ini

**Tabel 11**  
**Perbandingan Frame**

<b>Elemen</b>	<b>Kompas</b>	<b>Republika</b>
<b>Define Problem</b>	Masalah Hukum	Masalah Moral
<b>Diagnoses causes</b>	FPI	Komunisme
<b>Moral evaluation</b>	Menciderai Kebinekaan	Membawa Ideologi Gaya Baru Komunis Misi Luhur FPI
<b>Treatment Recommendation</b>	Penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan	Surat Keputusan Bersama (SKB), pembubaran Ahmadiyah



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sasaran akhir sebuah penelitian adalah menjawab pertanyaan dari perumusan masalah. Berdasarkan hasil dari penelitian ini terhadap bahasan utama pada pemberitaan Koran Kompas dan Koran Republika terkait penyebab terjadinya insiden Monas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Pemberitaan terkait kekerasan yang dilakukan FPI terhadap massa Papernas yang terjadi pada tanggal 2 Mei 2007. Ternyata menyita banyak perhatian media, khususnya Kompas dan Republika. Peneliti melihat bahwa adanya perbedaan pandangan dalam melihat peristiwa kasus kekerasan ini

#### **1. Kompas**

*Kompas* dengan idiloginya sebagai media yang menjunjung tinggi keberagaman dan terkenal dengan sifat humanismenya. Menyatakan dengan jelas bahwa kasus kekerasan yang dilakukan *Front Pembela Islam* ini sebagai masalah hukum, bingkai hukum yang digunakan sebagai bingkai yang dominan dalam pemberitaan Kompas. Hal itu bisa dilihat dari semua judul-judul berita yang diangkat dalam pemberitaan Kompas. Di sisi lain peneliti juga melihat adanya kecenderungan penonjolan aspek tertentu dan mengabaikan aspek yang lainnya yang dilakukan oleh Kompas. Dalam penulisan beritanya Kompas lebih banyak menyertakan kutipan-kutipan dari narasumber yang sangat mengecam aksi kekerasan yang dilakukan FPI tersebut. Bukan hanya itu untuk lebih menegaskan bahwasanya aksi kekerasan FPI tersebut sebagai masalah hukum. Kompas

juga menyertakan gambar sebagai penegasan terhadap kasus tersebut sebagai masalah hukum.

Dalam struktur wacana Van Dijk, Kompas mendefinisikan kasus ini sebagai masalah hukum bukan masalah politik ataupun moralitas tapi mutlak masalah hukum. aksi kekerasan yang mengakibatkan banyak massa Papernas yang terluka menjadikan masalah ini harus diselesaikan melalui jalur hukum. Kompas juga menjadikan FPI sebagai penyebab masalah dalam aksi kekerasan tersebut. Dari pemelihan FPI sebagai sumber masalah maka timbul tulisan-tulisan yang memberikan penilaian moral terhadap aksi tersebut. Nilai moral yang diberikan Kompas dalam melihat kasus ini adalah sebagai tindakan yang sudah menciderai kebhinekaan bangsa Indonesia. rekomendasi yang diberikanpun sangat jelas bahwa republik menginginkan para pelaku kekerasan tersebut di hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Peneliti menyimpulkan bahwa frame yang dikembangkan Kompas tidak lepas dari ideologi media tersebut. Sebagai media yang menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman. Semua tindakan yang dilakukan FPI selalu dipandang buruk oleh Kompas.

## **2. Republika**

Secara garis besar pembingkaiian yang dilakukan oleh Republika sangat berbanding terbalik dengan apa yang dikembangkan oleh Kompas. Mungkin ini disebabkan karna ideologi dari kedua media tersebut yang berbeda. Republika yang memiliki besik islam dalam setiap visi dan misi nya, melihat persoalan kasus kekerasan yang dilakukan FPI ini bukan sebagai masalah hukum, maslah moral. Bingkai moral lebih dominan dalam pemberitaan Kekerasan yang dilakukan FPI terhadap massa Papernas tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dari judul-judul yang diangkat sedikitpun Republika tidak memandang peristiwa tersebut sebagai pencideraan terhadap kebhinekaan atau aksi radikalisme. Republika lebih

menyoroti peristiwa kekerasan tersebut terhadap akar masalahnya. FPI sama sekali tidak dipandang sebagai penyebab melainkan isu komunislah yang dijadikan oleh Republika sebagai penyebab terjadinya kekerasan tersebut. Kecendrungan penonjolan aspek tertentu dan mengabaikan aspek yang lainya juga sangat terlihat dalam pemberitaan Republika. Kutipan-kutipan narasumber yang disertakan dalam pemberitanya cenderung dari pihak-pihak yang sejalan dengan pemikiran dan visi-misi dari media tersebut, dalam hal ini adalah Republika.

Dari segi struktur wacana Van Dijk. Republika mengidentifikasi peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh FPI ini sebagai masalah moral. Republika sedikitpun tidak memandang masalah ini sebagai masalah hukum, kalupun ada yang berbicara hukum, tuntutan hukum itu lebih banyak ditujukan terhadap Ahmadiyah yang dipandang oleh Republika sebagai sumber masalah atau penyebab terjadinya kekerasan tersebut. Setelah menetapkan Ahmadiyah sebagai sumber masalah maka pada akhirnya timbul penilaian moral yang diberikan terhadap peristiwa tersebut, yaitu, lambanya pemerintah dalam menangani kasus Ahmadiyah. Republika memandang Pemerintahlah yang seharusnya bertanggung jawab atas peristiwa kekerasan itu.

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam memberitakan peristiwa bentrokan FPI dan massa Papernas. Peneliti melihat adanya frame yang dilakukan oleh media tersebut dalam memberitakan peristiwa kekerasan tersebut. Ketidak berimbangan narasumber yang di sertakan dalam pemberitaan, dan juga menghilangkan fakta yang ada tetapi lebih melihat fakta yang lain.

## **B. Saran**

1. Bagi peneliti yang ingin meneliti teks berita, bisa memperdalam dengan analisis wacana kritis untuk bisa menganalisis berita secara mendalam, karena dianalisis secara multistruktur sehingga sehingga dapat dilihat hasil yang sempurna
2. Peneliti menyadari adanya bias dalam mengkonstruksikan berita di media massa. Berita tidak terbentuk begitu saja, berita merupakan hasil konstruksi antara institusi media dan wartawan. Media dan wartawan hendaknya memiliki pegangan bagi apa yang ingin disampaikan kepada khalayak. Antara lain bersikap akurat, tidak arogan, kecepatan dan jujur terhadap kebenaran. Akurat berarti, seorang wartawan atau sebuah institusi media haruslah mendapatkan informasi yang pasti dan tidak bisa di bantah. Harus disadari bahwa mengira dan menduga akan berakibat pada tuntutan hukum serta hilangnya kredibilitas dan nama baik suatu media. Alangkah lebih baik ketika media dan wartawan berhati-hati dalam menyampaikan berita, karena bias yang ditampilkan media massa dalam mengkonstruksi realitas bisa saja berakibat pada konflik. Kecepatan dan persaingan bukanlah hal yang baru bagi sebuah media maupun wartawan. Seorang wartawan harus mampu menghasilkan tulisan yang dapat dipercaya dalam keadaan tekanan waktu, harus pandai dan tenang dalam menghadapi berbagai tekanan, wartawan harus menghasilkan berita dengan kecepatan kilat yang isinya seakan-akan tidak dibuat dengan terburu-buru. Jujur terhadap kebenaran ialah jujur dalam mengumpulkan dan menyajikan fakta dan informasi

Kepada khalayak pembaca ataupun penikmat berita, hendaknya menerima informasi tidak hanya dari satu sumber berita saja. Tidak hanya membaca satu surat kabar saja, tidak hanya menonton dan mendengarkan berita dari satu program berita saja, tetapi mencari lebih banyak lagi sumber informasi dari surat kabar lain serta program-program berita yang ada di televisi atau radio.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2007). *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Effendy, O. U. (2003). *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing, Konstruksi Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS.
- KOMPAS. (2007). *Menulis dari Dalam*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Kriyanto, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moscow, V. *The Political Economy of Communication*. London: Sage Publication.
- Sobur, A. (2004). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika, dan Analisis Framing*. Rosda Karya: Bandung.
- Sudibyo, A. (2001). *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKIS.
- Majid, N. (1995). *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Paramadina.
- Zuly Qodir. (2011). *Sosiologi Agama: Esai-esai Agama di Ruang Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Imarah, Muhammad. (1999). *Fundamentalisme dalam Perspektif Pemikiran Barat dan Islam*. Terjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kuntowijoyo. (1997). *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.
- Azyumardi, Azra. (1996). *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalis, Modernisme hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina.
- Turmudi, Endang. (2005). *Islam Dan Radikalisme Di Indonesia*. Jakarta: Lipi-press.
- Lahman, Thareq. (2013). *Petualangan Terorisme Dari Pengkafiran sampai Pengeboman*. Jakarta: syahamah-press

Artikel:

KOMPAS, *Khebinekaan Dicederai*, 2 Mei 2007

KOMPAS, *Negara Tidak Boleh Kalah*, 3 Mei 2007

KOMPAS, *Polda Beri Ultimatum*, 4 Mei 2007

KOMPAS, *DPR Memuji Langkah Pemerintah*, 5 Mei 2007

KOMPAS, *Ketua FPI Jadi Tersangka*, 6 Mei 2007

KOMPAS, *Munarman Belum Menyerahkan Diri*, 7 Mei 2007

REPUBLIKA, *Bentrokan Akibat Pemerintahan Lamban*, 2 Mei 2007

REPUBLIKA, *Masyarakat Diminta untuk Bersatu*, 3 Mei 2007

REPUBLIKA, *Akar Masalahnya Ahmadiyah*, 4 Mei 2007

REPUBLIKA, *Umat Islam Diimbau untuk Bersatu*, 5 Mei 2007

REPUBLIKA, 14 OKP: *Jangan Ada Diskriminasi*, 6 Mei 2007

REPUBLIKA, 14 OKP: *Ustadz Jefry : SBY Harus Adil*, 7 Mei 2007